

**Pengalaman Pendidikan Politik Partai Keadilan Sejahtera Pada
Era Pandemi Covid-19 di Kota Bogor**

Skripsi

Program Studi Ilmu Politik



MUHAMAD FARHAN MAULANA

1706016043

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN

Walisongo Semarang

2022

Nota Pembimbing

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth. Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik UIN
Walisongo Semarang
Di Tempat

Assalamualaikum wr.wb

Setelah Membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya. Maka kami menyatakan bahwa skripsi dari mahasiswa:

Nama : Muhamad Farhan Maulana

NIM : 1706016043

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : “Pengalaman Pendidikan Politik Partai Keadilan Sejahtera Pada Era Pandemi Covid-19 di Kota Bogor”

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera dapat diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Semarang, 14 Juni 2022

Pembimbing

Muhammad Mahsun M.A



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Prof.Dr. Hanka Km. 1 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. - Semarang 50185

BERITA ACARA MUNAQSAH

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang pada :

Hari : Kamis

Tanggal Ujian : 23 Juni 2022

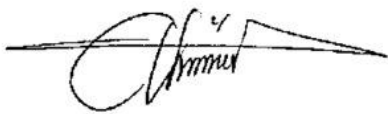
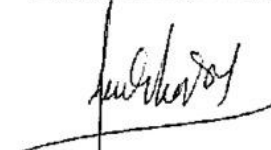


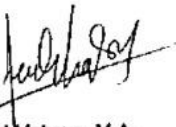
telah melaksanakan ujian Munaqosah SKRIPSI atas :

Nama : MUHAMAD FARHAN MAULANA

NIM / Jurusan : 1706016043 / Ilmu Politik

Status : Baru

dengan penguji dan pembimbing sebagai berikut :

<p>Ketua Sidang / Penguji</p>  <p>Dr. AHWAN FANANI, M.Ag. NIP. 197809302003121001</p>	<p>Sekretaris Sidang / Penguji</p>  <p>Muhammad Mahsun, M.A. NIP.</p>
<p>Penguji Utama I</p>  <p>Sholkah Mufrikah, M.Si. NIP.</p>	<p>Penguji Utama II</p>  <p>MOH. YAMIN DARSYAH, M.Si. NIP. 198409092019031007</p>
Nilai : 3.60	Nilai : 3.60
Nilai Kumulatif : 3.6	
<p>Pembimbing I</p>  <p>Muhammad Mahsun, M.A. NIP.</p>	<p>Pembimbing II</p> <p>NIP.</p>
Nilai : 3.80	Nilai :

LULUS

Pernyataan Keaslian Skripsi

Dengan ini saya Muhamad Farhan Maulana menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul “Pengalaman Pendidikan Politik Partai Keadilan Sejahtera Pada Era Pandemi Covid-19 di Kota Bogor” merupakan hasil kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Juni 2022

Yang menyatakan,

Muhamad Farhan Maulana

NIM. 1706016043

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul penelitian **“Pengalaman Pendidikan Politik Partai Keadilan Sejahtera Pada Era Pandemi Covid-19 di Kota Bogor”**. Sholawat dan salam juga dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan umatnya jalan terang.

Skripsi ini merupakan sebuah tulisan penulis yang didalamnya membahas mengenai pendidikan politik yang dilakukan oleh PKS selama masa pandemi. Penelitian ini menggambarkan mengenai bagaimana peran partai politik sebagai agen Pendidikan politik pada kader dan masyarakat selama masa pandemi Covid-19, didalamnya terdapat berbagai penjelasan mengenai strategi, metode dan isu yang di usung oleh Partai PKS di Kota Bogor untuk kader dan masyarakat.

Skripsi ini juga merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.sos) dari UIN Walisongo Semarang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penelitian ini terdapat kekurangan, namun dukungan dan semangat datang dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Imam Taufiq M. Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang;
2. Ibu Dr. Misbah Zulfa Elizabeth M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang;
3. Bapak Drs. Nur Syamsudin, M.Ag selaku Kepala Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang;
4. Bapak Muhammad Mahsun M.A selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing penulis yang selalu memberikan arahan, masukan dan bimbingan dengan sabar kepada penulis sehinggalupenulis sampai pada tahap ini;
5. Bapak Rofiq, M.Si selaku Dosen Wali penulis yang senantiasa memberikan bimbingan perwalian dan perhatian kepada mahasiswa bimbingannya sejak semester pertama sampai akhir;
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Politik yang memberikan pendidikan yang sangat luar biasa kepada penulis. Kemudian tak lupa juga

kepada Staff FISIP UIN Walisongo yang memberikan pelayanan akademik kepada mahasiswa dengan baik;

7. Bapak Adityawarman Adil sebagai perwakilan dari Kader dan Bendahara DPD PKS Kota Bogor yang memberikan izin kepada saya untuk mendapatkan izin penelitian di DPD PKS Kota Bogor;
8. Bapak Erry Nugroho sebagai perwakilan dari Kader dan Ketua DPC PKS Tanah Sareal Kota Bogor yang senantiasa memberikan waktunya untuk diwawancarai sebagai narasumber;
9. Bapak Dedi Mulyono sebagai perwakilan dari Kader dan Sekhum DPD PKS Kota Bogor yang memberikan waktunya untuk diwawancarai sebagai narasumber;
10. Bapak Fazlur sebagai perwakilan dari Kader PKS Kota Bogor yang memberikan waktunya untuk diwawancarai sebagai narasumber;
11. Bapak Budi Bahtiar sebagai perwakilan dari Fraksi PKS Kota Bogor yang senantiasa memberikan waktunya untuk diwawancarai sebagai narasumber;
12. Bapak Gunawan sebagai perwakilan dari Staff Ahli Fraksi PKS Kota Bogor yang senantiasa memberikan waktunya untuk diwawancarai sebagai narasumber;
13. Bapak Untung sebagai wartawan dari Radar Bogor yang memberikan waktunya untuk diwawancarai sebagai narasumber;
14. Bapak Rizky sebagai wartawan dari Bogor Daily yang memberikan waktunya untuk diwawancarai sebagai narasumber;
15. Bapak Haris, Bapak Rustam, Ibu Marni dan Bapak Syahroni sebagai masyarakat Kota Bogor yang memberikan waktunya untuk diwawancarai sebagai narasumber;
16. Mama, Ayah, Salfa, Fajri, Nenek Elly dan segenap keluarga besar Anis dan Elly tercinta penulis yang memberikan dukungan tak terhingga baik lahir maupun batin yang mungkin tidak bisa diungkapkan dengan kata karena begitu banyaknya dan hanya bisa terucap terima kasih untuk semua kasih dan cinta yang diberikan, penulis akan sukses dan berhasil untuk kalian;
17. Elsa Frida Ramadhanti yang telah menemani dan menyemangati selama penulis menyelesaikan penelitian ini. Jika kata tidak bisa diucapkan maka besar harapan jika tulisan ini adalah sebuah surat makna yang dapat dirasakan, semoga kebahagiaan selalu menyertaimu;

18. Sepupu-sepupu saya yang tergabung dalam grup Roti Jala Squad, yakni Ka Fia, Jihan, Zahra, Agib, Nabila. Kalian sangat mantap, semoga kesuksesan menyertai kita semua;
19. Sahabat-sahabat saya Dzaki, Syahril, Fifi, Padang, Mahar, Ajib, Dony, Irfan, Yanuar, Ilham Pirit, Ilham Supratman, Haekal, Obed, Rakha, Dewi yang telah memberikan kesenangan, doa dan semangat kepada penulis dalam mengerjakan tugas akhir skripsi;
20. Teman seperbimbingan Pak Mahsun, yakni Lailatun alias Atun dan Desy alias Salsa yang sama-sama ambisius demi mengejar tanda tangan pembimbing. Cepat atau lambat Insha Allah kesuksesan pasti akan menyertai;
21. Semua pihak yang mungkin namanya tidak tertulis namun telah memberikan banyak keberkahan kepada penulis di dalam kehidupannya.

Kepada semua pihak, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah dilakukan.

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Semarang, Juli 2022

Muhamad Farhan Maulana

Pengalaman Pendidikan Politik Partai Keadilan Sejahtera Pada Era Pandemi Covid-19 di Kota Bogor

Muhamad Farhan Maulana (1706016043)

Abstrak

Sejak pertama kali ditemukan di Indonesia pada awal tahun 2020, COVID-19 sangat mudah menyebar. Untuk menanggulangnya pemerintah Indonesia mengadopsi kebijakan pembatasan kegiatan dan mobilitas sosial. Secara politik kebijakan ini berdampak pada aktivitas partai politik, termasuk kegiatan pendidikan politik terhadap kader dan masyarakat. Maka dari itu, penulis melakukan kajian tentang pengalaman pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) selama masa pandemi tahun 2020 hingga 2022. Kajian ini dilakukan dengan menjawab pertanyaan penelitian utama berikut ini: Bagaimana strategi yang digunakan oleh PKS dalam memberikan pendidikan politik untuk kader dan masyarakat di masa pandemi Covid-19 di Kota Bogor?; Media seperti apa yang diadopsi oleh PKS dalam memberikan pendidikan politik kepada kader dan masyarakat selama masa pandemi Covid-19 di Kota Bogor?; Apa isu yang diusung oleh PKS dalam memberikan pendidikan politik kepada kader dan masyarakat selama masa pandemi Covid-19 di Kota Bogor?.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, dalam studi ini peneliti menggunakan teori partai politik yang dikembangkan oleh Budiardjo (2013) dan teori pendidikan politik yang dikembangkan oleh Kartono (1996), sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus DPD PKS di Kota Bogor. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan kajian dokumen atau literatur yang kemudian dianalisis melalui tahapan penelitian yang dijelaskan Miles dan Hubberman dan analisis isi.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa PKS Kota Bogor memiliki strategi pendidikan politik khusus untuk kader di masa pandemi dengan mengadopsi konsep pendidikan tatap muka terbatas (*hybrid*) dengan protokol kesehatan yang tinggi serta aplikasi pertemuan daring (*Zoom, WhatsApp, Google Meet* dan *Telegram*) di waktu tertentu, dan untuk masyarakat PKS Kota Bogor memaksimalkan peran media sosial dan aplikasi pertemuan daring untuk melaksanakan berbagai kajian pendidikan politik. Adapun media yang digunakan guna melaksanakan kaderisasi PKS Kota Bogor memanfaatkan dua media, yaitu offline dan online sekaligus sementara pendidikan politik untuk masyarakat hanya dilakukan dengan media online yang memaksimalkan peran media sosial. Isu yang digunakan kaderisasi fokusnya adalah pemahaman agama, partai dan peradaban termasuk isu covid-19 sedangkan untuk masyarakat PKS menggunakan isu-isu yang sedang *trending* di masyarakat.

Kata kunci: Partai Politik, Pendidikan Politik, Media Sosial, Kaderisasi.

The Experience of Political Education of the Partai Keadilan Sejahtera in the Era of the Covid-19 Pandemic in Bogor

Muhamad Farhan Maulana (1706016043)

Abstract

Since it was discovered in Indonesia in early 2020, COVID-19 is very easy to spread. To overcome this, the Indonesian government adopted a policy of limiting activities and social mobility. Politically, this policy has an impact on the activities of political parties, including political education activities for cadres and the community. Therefore, the author conducted a study of the experience of political education carried out by the Partai Keadilan Sejahtera (PKS) during the pandemic. This study was conducted by answering the following main research questions: What are the strategies used by PKS in providing political education for cadres and the public during the Covid-19 pandemic in Bogor?; What kind of media has been adopted by PKS in providing political education to cadres and the public during the Covid-19 pandemic in Bogor?; What are the issues promoted by PKS in providing political education to cadres and the public during the Covid-19 pandemic in Bogor?

To answer the research questions above, in this study the researcher uses the theory of political parties developed by Budiardjo (2013) and the theory of political education developed by Kartono (1996), while the research method used in this study is a qualitative research method with a DPD case study approach. PKS in Bogor. The data collection techniques used were interviews, observations and document or literature studies which were then analyzed through the research stages described by Miles and Huberman and content analysis.

Based on the results of this study, it was found that PKS Bogor has a special political education strategy for cadres during the pandemic by adopting the concept of limited face-to-face education (hybrid) with high health protocols and online meeting applications (Zoom, WhatsApp, Google Meet and Telegram) at the same time. certain, and for the PKS community in Bogor to maximize the role of social media and online meeting applications to carry out various studies of political education. The media used to carry out the regeneration of the Bogor City PKS utilizes two media, offline and online at the same time while political education for the community is only carried out with online media that maximizes the role of social media. The issues used for regeneration focus on understanding religion, parties and civilization, including the issue of covid-19, while for the PKS cadreization it uses issues that are trending in society.

Keywords: Political Parties, Political Education, Social Media, Cadreization.

Daftar Isi

Nota Pembimbing	1
Pernyataan Keaslian Skripsi	2
Abstrak	3
BAB I	
PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang	7
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan	11
D. Manfaat	12
E. Tinjauan Pustaka	13
1. Pendidikan Politik untuk Kader Partai	13
2. Pendidikan Politik untuk Masyarakat	15
3. Pendidikan Politik untuk Pemilih Pemula	17
F. Metodologi Penelitian	19
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	19
2. Jenis Data	20
3. Teknik Pengumpulan Data	20
4. Teknik Analisis Data	21
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II	
KERANGKA TEORI	26
A. Partai Politik	26
B. Pendidikan Politik	28
BAB III	
GAMBARAN UMUM	31
A. Lanskap Kota Bogor	32
B. PKS di Kota Bogor	38
1. PKS dalam Perpolitikan Nasional	38
2. DPD PKS Kota Bogor	40
3. Struktur Kepengurusan DPD PKS Kota Bogor	44
BAB IV	
STRATEGI PENDIDIKAN POLITIK PKS SELAMA MASA PANDEMI	47

A. Strategi Rekrutmen Kader PKS Kota Bogor	47
B. Strategi PKS dalam Melakukan Pendidikan Politik Kemasyarakatan	52
C. Pendidikan Kader PKS Kota Bogor	57
D. Pendidikan Politik Masyarakat di PKS Kota Bogor Selama Masa Pandemi	59
BAB V	
MEDIA DAN ISU PENDIDIKAN POLITIK DI MASA PANDEMI	79
A. Penerapan Metode Hybrid pada Kegiatan Pendidikan Politik PKS Kota Bogor	79
B. Media Sosial dalam Pendidikan Politik Kemasyarakatan Selama Masa Pandemi	83
C. Menentukan Isu Pendidikan Politik PKS di Media Sosial	91
BAB VI	
A. Kesimpulan	98
B. Saran	100
Daftar Pustaka	101
Lampiran-Lampiran	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Virus Corona atau Covid-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir 2019 lalu. Penyebaran virus tersebut sangat tidak terkendali sehingga sangat mudah berkembang dan menyebar seantero bumi. Di Indonesia kasus ini pertama kali ditemukan pada dua warga Depok, Jawa Barat awal Maret 2020 dan saat ini Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat penularan yang sangat tinggi. Bahkan, pada tanggal 1 Agustus 2021 Indonesia masuk dalam 5 besar negara dengan paling banyak kasus Covid-19 aktif, yaitu 545.447 WNI yang terkonfirmasi positif mengidap virus tersebut. Sejak Covid-19 mengganas di Indonesia, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menangani persebaran virus, mulai dari program vaksinasi massif hingga pembatasan kegiatan masyarakat yang luas berdasarkan tingkat keparahan paparan suatu daerah (Perasso, 2021).

Pandemi Covid-19 tidak bisa dikendalikan secara cepat sehingga membutuhkan penatalaksanaan yang begitu tepat baik dari pemerintah maupun masyarakat. Maka dari itu salah satu pencegahan untuk memutus penularan Covid-19 yang dihimbau oleh pemerintah adalah tetap tinggal di rumah atau pembatasan kegiatan masyarakat. Hal tersebut nyatanya mampu melumpuhkan aktivitas semua kalangan masyarakat yang dilakukan di luar rumah, dimulai dari belanja, bekerja, liburan, pendidikan, bahkan kebijakan pembatasan kegiatan tersebut telah mempengaruhi sebuah sistem politik, yang sebelumnya diwarnai pesta demonstrasi sekarang menjadi tidak, komunikasi antar pemimpin secara tatap muka menjadi terbatas, massa politik pun tidak dapat bergerak bebas sehingga penampungan aspirasi menjadi sedikit tersendat (Suryadi 2020).

Selain itu, pandemi Covid-19 juga berdampak pada aktivitas partai politik, salah satunya adalah pada pemberian atau pembekalan pendidikan politik terhadap kader dan masyarakat. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah unsur kegiatan politik yang tidak kalah penting dari hanya sekedar aspirasi politik, karena diharapkan dengan pendidikan politik dapat menjadi sarana bagi terwujudnya masyarakat dan kader yang memiliki pengetahuan mengenai

persoalan politik serta memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pendidikan politik diperlukan bukan saja bagi para pemilih yang kurang atau belum memiliki pemahaman tentang persoalan politik tetapi juga bagi para pemilih yang sudah memiliki pengetahuan tentang persoalan politik. Hal demikian dikarenakan sikap apatis terhadap kegiatan politik dimungkinkan muncul dari kalangan masyarakat yang memiliki pengetahuan politik, dikarenakan adanya kekecewaan serta frustrasi terhadap sistem politik yang ada, kondisi diperparah dengan pandemi Covid-19 yang memaksa untuk masyarakat agar tidak berbaur dan menimbulkan kerumunan yang mana hal tersebut bertolak belakang dengan pendidikan politik yang bersifat umum dan massal.

Pendidikan politik memiliki makna yang penting dan strategis dalam rangka mendorong warga negara (pemilih) untuk memiliki pengetahuan politik yang memadai. menurut Edgar Fore sebagaimana dikutip oleh Utsman (Ruslan, 2000) mendefinisikan pendidikan politik sebagai penyiapan generasi untuk berfikir merdeka seputar esensi kekuasaan dan pilar-pilarnya dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran politik dan mendidik karakter manusia nonformal oleh partai politik, media massa dan lembaga swadaya masyarakat. Karena itu, pendidikan politik merupakan agenda yang sangat penting, karena dalam melangsungkan pembangunan sebuah bangsa memerlukan syarat untuk keterdidikan rakyat secara politik, rakyat yang terdidik secara politik itu sendiri dapat dimaksudkan sebagai warga negara yang secara sadar mandiri ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembangunan negara (Ashar, 2011). Kehadiran partai politik dapat dilihat pada perannya dalam melakukan pendidikan politik kepada warga masyarakat. Dengan pendidikan politik masyarakat dimungkinkan untuk memiliki kebudayaan politik yang ideal, yakni kesadaran untuk mendukung sistem politik dan sekaligus mampu memberikan kritik dan koreksi (Omami, 2017).

Bagi negara demokrasi, pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik memiliki arti yang penting karena partai politik tidak hanya memberikan pengetahuan atau strategi untuk mengelola partai politik ataupun strategi kemenangan pada pemilu tetapi juga memberikan pendidikan dasar mengenai wawasan demokrasi partisipasi bagi masyarakat secara umum, namun hal yang berbeda tentu saja terjadi selama masa pandemi Covid-19, fungsi-fungsi pokok

partai politik tersebut mengalami banyak hambatan, sementara partai politik

dituntut untuk mendesain strategi maupun metode yang dapat beradaptasi dengan pandemi Covid-19. Studi yang saya susun ini ingin mengkaji bagaimana partai politik pada tingkatan lokal melakukan pendidikan politik di masa pandemi Covid-19, untuk tujuan itu penelitian ini akan dilakukan dengan mengkaji Partai Keadilan Sejahtera di Kota Bogor. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah: Mengapa PKS? Karena PKS adalah salah satu partai yang memiliki suara relatif besar di Kota Bogor.

Suara Partai PKS dari pemilihan legislatif (pileg) tahun 2009 sampai 2019 mengalami perkembangan naik-turun, namun dibandingkan pada pileg 2014, perolehan suara PKS pada pileg tahun 2019 di Kota Bogor mengalami perkembangan yang signifikan, hal ini dapat diketahui melalui penguasaan kursi di DPRD Kota Bogor dimana pada tahun 2009 PKS berhasil meraup 7 kursi di DPRD Kota Bogor, sementara pada periode selanjutnya 2014 jumlah suara yang dimiliki PKS menurun menjadi 5 kursi. Tetapi dampak besar terjadi pada 5 tahun selanjutnya yaitu 2019 dimana PKS berhasil memperoleh 10 kursi dari 50 kursi yang tersedia. Lebih detail, perolehan suara DPRD Kota Bogor dari tahun 2009 hingga 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 1 komposisi anggota DPRD Kota Bogor dalam tiga periode terakhir.

Partai Politik	Jumlah Kursi dalam Periode		
	2009-2014	2014-2019	2019-2024
PKB	0	1	3
Gerindra	2	6	8
PDI-P	6	8	8
Golkar	6	6	5
NasDem	-	1	1
PKS	7	5	10
PPP	3	5	5
PAN	2	3	3
Hanura	3	4	1
Demokrat	15	5	5

PBB	1	1	1
Jumlah Anggota	45	45	50

Sumber: Setwan DPRD Kota Bogor, 2019.

Tabel di atas memberikan penjelasan bahwa dibandingkan dengan PKB, PPP, PAN dan PBB, PKS berhasil sebagai partai berbasis Islam yang mengalami berkembang suara relatif lebih baik di DPRD Kota Bogor. Bahkan suara PKS juga mengalahkan partai-partai nasionalis yang menjadi partai dominan secara nasional, seperti PDIP, Gerindra dan Golkar. Fenomena kemenangan PKS itu menunjukkan bahwa partai ini mampu menggerakkan sebagian besar peran politik dalam lingkup kota, serta memegang peranan terbesar dan massif sebagai partai pemenang pemilihan legislatif. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana PKS secara kelembagaan melaksanakan pendidikan politik di era pandemi Covid-19. Mengingat Indonesia dilanda kondisi khusus seperti ini, maka perlu dilakukan beberapa adaptasi agar kegiatan pendidikan politik tetap berjalan.

Penelitian mengenai pendidikan politik oleh PKS ini sudah banyak dilakukan oleh para sarjana. Diantara studi itu dilakukan oleh Ashar (2021) dalam tulisannya yang berjudul “Pelaksanaan Pendidikan Politik oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat.” Tulisan ini fokus pada upaya penguatan dan peningkatan kader partai. Penelitian yang senada dilakukan oleh Rianto (2018) dalam tulisannya yang berjudul “Peranan PKS dalam Memberikan Pendidikan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Barat 2018.” Tulisan ini berfokus pada pemahaman terhadap proses pendidikan politik yang dilakukan partai berbasis keagamaan pada kader dan masyarakat umum.

Dari dua tulisan tersebut hanya fokus pada persoalan pengalaman pendidikan politik secara umum, namun belum banyak studi oleh sarjana lain termasuk penelitian diatas yang memberikan fokus terhadap kajian mengenai kegiatan pendidikan politik oleh PKS selama masa pandemi Covid-19. Melalui studi ini penulis hendak melakukan kajian tentang pengalaman pendidikan politik yang dilakukan oleh PKS selama masa pandemi. Secara spesifik dalam tulisan ini peneliti ingin memfokuskan penelitian mengenai bagaimana

pelaksanaan pendidikan politik Partai Keadilan Sejahtera di masa pandemi Covid-19 melalui pemahaman pada strategi, media dan isu yang digunakan pada program kaderisasi dan program kemasyarakatan pada tahun 2020 hingga 2022. Strategi yang dimaksud adalah untuk meneliti bagaimana strategi penerapan pendidikan politik sebagai upaya peningkatan partisipasi politik di tengah masa Pandemi Covid-19, lalu bagaimana penerapan media daring maupun luring untuk melakukan pendidikan politik yang digunakan PKS selama masa Pandemi Covid-19 lalu isu apa saja yang diusung PKS dalam menerapkan pendidikan politik pada kader dan masyarakat di masa pandemi. Melalui latar belakang yang telah diuraikan, peneliti menyusun sebuah proposal dengan judul “Pengalaman Pendidikan Politik Partai Keadilan Sejahtera Pada Era Pandemi Covid-19 di Kota Bogor.”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian yang akan dicari jawabannya. Rumusan masalah harus berkaitan dengan tema dan latar belakang masalah penelitian. Maka dari itu setelah menyusun latar belakang tersebut, dapat disimpulkan sebuah rumusan masalah utama untuk menjadi pertanyaan utama pada penelitian ini.

Bagaimana pelaksanaan pendidikan politik Partai Keadilan Sejahtera di masa pandemi Covid-19?

1. Bagaimana strategi yang digunakan oleh PKS dalam memberikan pendidikan politik untuk kader dan masyarakat di masa pandemi Covid-19 di Kota Bogor?
2. Media seperti apa yang diadopsi oleh PKS dalam memberikan pendidikan politik kepada kader dan masyarakat selama masa pandemi Covid-19 di Kota Bogor?
3. Apa isu yang diusung oleh PKS dalam memberikan pendidikan politik kepada kader dan masyarakat selama masa pandemi Covid-19 di Kota Bogor?

C. Tujuan

Tujuan penelitian tentang “Pengalaman Pendidikan Politik Partai Keadilan Sejahtera Pada Era Pandemi Covid-19 di Kota Bogor” ini adalah

sebagai berikut:

1. Mengetahui strategi yang digunakan oleh PKS dalam memberikan pendidikan politik untuk kader dan masyarakat di masa pandemi Covid-19 di Kota Bogor.
2. Memahami media yang diadopsi oleh PKS dalam memberikan pendidikan politik kepada kader dan masyarakat selama masa pandemi Covid-19 di Kota Bogor?
3. Mengetahui isu yang diusung oleh PKS dalam memberikan pendidikan politik kepada kader dan masyarakat selama masa pandemi Covid-19 di Kota Bogor.

D. Manfaat

Manfaat penelitian merupakan nilai guna atau fungsi dari hasil penelitian yang diharapkan. Manfaat penelitian meliputi manfaat secara teoritik (pengembangan ilmu pengetahuan) dan praktis (manfaat yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, kebijakan, dan terapan).

1. Manfaat Teoritik:
 - a. Memberikan sumbangsih teoritik pada diskursus studi tentang pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik.
 - b. Sebagai pembanding atau literatur review bagi studi-studi tentang pendidikan politik oleh partai politik yang akan dilakukan oleh sarjana lainnya.
2. Manfaat Praktik:
 - a. Sebagai syarat kelulusan studi di Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang.
 - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan kemampuan partai melakukan pendidikan politik bagi pengurus, kader, simpatisan maupun masyarakat umum.

E. Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini penulis ingin memberikan diskusi tentang kajian-kajian mengenai pendidikan politik yang berasal dari sarjana lain. Pembahasan ini penting sebagai pembanding sekaligus sebagai langkah awal bagi penulis untuk memahami *gap* teoritik yang ada di dalam diskursus tentang pendidikan politik yang telah dikaji oleh banyak sarjana sebelumnya.

Beberapa kajian penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh penulis dikelompokkan menjadi 3 tema, Di dalam menyajikan kajian literatur *review* atau kajian pustaka, penulis kelompokkan menjadi 3 tema yaitu, pendidikan politik untuk kader partai; pendidikan politik untuk masyarakat; dan pendidikan politik untuk pemilih pemula. Berikut dibawah ini penjelasannya:

1. Pendidikan Politik untuk Kader Partai

Penelitian yang pertama mengenai pendidikan politik untuk kader partai adalah penelitian yang dilakukan oleh Rianto yang fokus pada bagaimana proses serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (Rianto 2019) . Temuan dari penelitiannya menunjukkan bahwa Pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Partai Keadilan Sejahtera dalam menyongsong pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Barat 2018 dilakukan dengan berbagai kegiatan seperti seminar-seminar, pengajian rutin setiap pekan untuk kader, dan kajian-kajian umum untuk masyarakat pada umumnya (pemilih), dan pendidikan politik dilakukan melalui media sosial, media pribadi, media cetak maupun elektronik. Metode yang digunakan Partai Keadilan Sejahtera dalam melaksanakan pendidikan politik melalui *door-to-door* dan penyampaian melalui kajian-kajian agama dan juga seminar-seminar kepemimpinan dan pendidikan politik (Rianto, 2019:4). Penelitian ini menggunakan teori mengenai pendidikan politik dari (Kantaprawira, 2006).

Penelitian kedua adalah penelitian mengenai makna Pendidikan politik bagi Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat terhadap nilai- nilai pancasila (Wibowo, 2021) . Peneliti berargumen bahwa meskipun menggunakan islam sebagai asas

perjuangan, namun DPW PKS Jawa Barat tetap mengakui Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, dengan anggapan umat Islam dalam pergulatan sejarah mendirikan negara Indonesia ini turut andil dan berkontribusi besar pada masa itu. Namun berdasarkan hasil temuan di lapangan, DPW PKS Jawa Barat mengakui terdapat beberapa kelompok dari kader Partai Keadilan Sejahtera yang tidak mengakui Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Hal ini dipengaruhi oleh sejarah Partai Keadilan sebelum menjadi Partai Keadilan Sejahtera yang sekarang. Para kelompok-kelompok kecil tersebut menyebut Pancasila dengan istilah “*thogut*” yang memiliki arti menyembah selain Allah.

Penelitian yang ketiga adalah penelitian mengenai Partai Golkar di Kabupaten Paser Kalimantan Timur yang melakukan Pendidikan Politik, karena melihat Fenomena yang terjadi Partai Golkar Kabupaten Paser selalu memenangkan pemilihan umum, akan tetapi dulangan suara yang diperoleh terus mengalami penurunan (Kurniawan, 2014). Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa pendidikan politik yang diberikan Partai Golkar Kabupaten Paser belum terlalu intens diberikan kepada kader-kadernya. Dan dari sekian banyak program kegiatan hanya ada beberapa yang menyentuh ranah pendidikan politik, sedangkan kegiatan lainnya hanya pada fokus internalisasi tubuh partai. Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Ruslan (2000) yang memaknai pendidikan politik sebagai upaya-upaya yang dicurahkan oleh lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal, yang berusaha membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik yang sejalan dengan kultur politik orang-orang yang bergerak di lembaga-lembaga tersebut pada setiap warga negara.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang memiliki focus untuk mengkaji tentang kepribadian, kesadaran dan tingkat partisipasi politik para kader khususnya PPP pada persiapan Pilkada Kota Cimahi tahun 2012 melalui Pendidikan politik (Kurniasih, 2014). Dalam penelitian ini peneliti mendapati hasil penelitian yaitu bahwa Pendidikan politik kader Partai Persatuan Pembangunan PPP memiliki beberapa syarat-syarat yang belum terpenuhi yaitu: Kondisi eksternal yang menimbulkan gangguan yang serius. Sumber-sumber daya yang belum

memadai, terutama sumber dana untuk pelaksanaan aktivitas pendidikan politik. Komunikasi dengan kader PPP belum terlaksana dengan baik. Penelitian ini umumnya menggunakan teori yang menjelaskan bahwa komunikasi politik adalah bentuk komunikasi yang dilakukan oleh politisi dan para pelaku politik lainnya dengan tujuan untuk meraih sasaran spesifiknya (McNair, 2007).

Penelitian kelima adalah penelitian dari sebuah artikel yang berfokus untuk mengidentifikasi model pendidikan politik yang digunakan oleh partai untuk menghasilkan anggota yang memiliki loyalitas memadai secara simultan kepada partai serta kesadaran dan budaya politik peserta aktif serta dampaknya untuk suara Pemilu (Nasiwan, 2005). Dalam penelitian ini mendapati temuan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Sleman, memiliki upaya pendidikan politik baik kepada anggota partai maupun masyarakat melalui institusi yang disebut Tarbiyyah Tsaqofiyah (TTs), dilengkapi dengan kegiatan Ta'lim Rutin Kelompok (TRK) dan Ta'lim Rutin Partai (TRP). Pendidikan politik pada pemilih yang dilakukan oleh PKS DPD Kabupaten Sleman pada anggota partai dan masyarakat pada umumnya memiliki kontribusi yang positif pada peningkatan kualitas pemilu tahun 2004 di Kabupaten Sleman baik pada tahapan proses pemilu 2004 maupun pada hasil pemilu 2004.

2. Pendidikan Politik untuk Masyarakat

Untuk penelitian serupa mengenai pendidikan politik untuk masyarakat adalah artikel yang berfokus pada temuan mengenai bagaimana penerapan pendidikan politik pada partai politik di Indonesia untuk masyarakat umum (Hermawan, 2020). Peneliti berpendapat bahwa pendidikan politik lebih menonjolkan tentang figur ketokohan, partai politik yang diidolakan sehingga tidak menyentuh pada substansi program dan kebijakannya. Menurut peneliti, esensi pendidikan politik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran berpolitik kepada anggota partai politik dan warga masyarakat. Individu dalam masyarakat tidak bisa terlepas dari ikatan politik. Masih dalam argumen

peneliti, pendidikan politik bukan mengobral janji, berpesta pora dan tebar pesona tetapi memberikan pemahaman, kemelekkan dan kesadaran dalam berpolitik. Setidaknya bahwa pendidikan politik membentuk kepribadian dan karakter bangsa yang disiplin, tanggung jawab, patriotik dan demokratis. Umumnya, peneliti menggunakan teori Kartono yang memiliki teori bahwa pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis/moral dalam pencapaian tujuan politik (Kartini, 1996).

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang berfokus pada deskripsi peran DPD Partai NasDem dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat di kota Pekanbaru, dan faktor-faktor penghambat pendidikan politik (Fadillah, 2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPD Partai NasDem Pekanbaru telah melakukan pendidikan politik kepada masyarakat luas, namun mengingat pendidikan politik tersebut belum maksimal. Beberapa hal yang mempengaruhi pendidikan politik sehingga pendidikan politik menjadi tidak optimal. Peneliti berargumen bahwa ketergantungan pengurus kepada kader partai yang duduk di kursi DPRD Kota Pekanbaru untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat menjadi masalah. Tidak adanya *reward and punishment* serta kontrol dari Lembaga pemerintahan terhadap partai politik dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat membuat partai politik kurang memperhatikan pendidikan politik bagi masyarakat. Pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat juga tidak sebagaimana seharusnya, pendidikan yang diberikan kerap kali masih sebatas pada promosi calon dan partai politik. perlunya perubahan dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, baik perubahan bentuk komunikasi, materi, maupun metode pelaksanaannya, guna mencapai tujuan yang sebenarnya yaitu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Penelitian selanjutnya merupakan penelitian yang berfokus pada analisa peran partai politik dalam pelaksanaan pendidikan politik di DPD PKS Kota Medan (Rahayu, 2012). Pada temuannya, peneliti menemukan bahwa Kader pernah melakukan pendidikan politik, walaupun melalui

khotbah atau ceramah keagamaan, hal ini terlihat dari jawaban-jawaban responden pada penelitian tersebut yang menyatakan bahwa melalui pendidikan politik, agar rakyat tidak terjadi pembodohan politik. Untuk itu pengurus harus selalu mengadakan pendidikan politik kepada rakyat, untuk menumbuhkan rasa percaya diri atau mendewasakan perpolitikan di seluruh lapisan masyarakat melalui sosialisasi politik, diskusi, seminar, media massa, maupun secara langsung dilapangan. Peneliti berpendapat bahwa pendidikan politik yang dilakukan PKS di Kota Medan hanya pada saat mendekati masa Pemilu atau hanya ketika kampanye, sehingga tidak adanya pendidikan berkelanjutan yang dapat bermanfaat saat atau tidak saat pesta demokrasi.

3. Pendidikan Politik untuk Pemilih Pemula

Penelitian selanjutnya berfokus tentang pendidikan politik oleh partai politik Islam dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kabupaten Purbalingga (Prasetyo, 2020). Dalam penelitian ini, partai politik Islam di Kabupaten Purbalingga memiliki upaya untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula melalui pendidikan politik yaitu berupa kegiatan yang menarik minat bakat pemilih pemula. Peneliti berpendapat bahwa untuk menarik minat para pemilih pemula, pendidikan politik yang dilakukan juga harus inovatif mengikuti perkembangan teknologi dan zaman. Selain itu partai politik Islam dapat melakukan pendekatan *cultural* masyarakat sekitar. Serta untuk meningkatkan suara partai, partai politik Islam dapat berkolaborasi dengan partai nasionalis dalam kontestasi pemilihan umum. Dengan demikian diharapkan pendidikan politik dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman pemilih pemula dalam berpolitik sehingga mampu meningkatkan partisipasi politik.

Penelitian selanjutnya adalah skripsi yang berfokus untuk meneliti peran parpol khususnya Partai Golkar Kota Tomohon dalam Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat atau pemilih pemula (Kaligis, 2016). Penelitian ini menggunakan teori dari Surbakti dimana Pendidikan politik dalam tulisan ini dipahami sebagai perbuatan memberi

latihan, melalui proses dialogik yang dilakukan dengan sukarela antara pemberi dan penerima pesan secara rutin, sehingga para penerima pesan dapat memiliki kesadaran berdemokrasi dalam kehidupan bernegara (Surbakti, 1992) . Dalam penelitiannya, peneliti menemukan untuk memberikan pendidikan politik DPD partai Golkar Kota Tomohon terhadap anggota partai atau para kader Golkar yaitu dengan mengadakan diklat dimana diberikan pengetahuan tentang bagaimana tugas sebagai calon legislatif dan pembelajar mengenai politik yang dinamakan diklat karakter. Bentuk pendidikan politik yang dilaksanakan PAC Partai Golkar Kecamatan Tomohon Utara meliputi: pertemuan rutin, pemantapan anggota, organisasi partai, strategi pemenangan calon dalam pemilu dan pengajian, pencerahan wawasan berpolitik. Cara penyampaian yang digunakan meliputi penyampaian pendidikan politik dengan diiringi unsur humoris, pendidikan politik menyangkut kesenian, diskusi, tanya jawab, presentasi. Adanya waktu pelaksanaan pendidikan politik yang tepat, dapat menarik kaum muda untuk berpartisipasi aktif mengikuti pendidikan politik yang dilaksanakan PAC Partai Golkar Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon. Dalam penelitian ini, peneliti berpendapat bahwa pemilih muda masih sangat apatis terhadap Pendidikan politik maupun politik praktis, sehingga PAC Partai Golkar Kecamatan Tomohon Utara harus mengembangkan strategi dan metode pendidikan politik yang inovatif dan kreatif, sehingga dapat meningkatkan peranannya dalam melaksanakan pendidikan politik terhadap masyarakat khususnya kaum muda. Hal tersebut bisa digunakan untuk menambah anggota dan meningkatkan dukungan dari kaum muda.

Berdasarkan uraian-uraian tulisan yang mengkaji pendidikan politik diatas ternyata lebih banyak menitikberatkan pada persoalan formal dan administratif seperti permasalahan dana, metode *mainstream*, sikap dan permasalahan politik di kaum muda, tapi tidak banyak atau tidak ada sama sekali yang mengkaji bagaimana pendidikan politik di masa pandemi dan tidak banyak pula yang memfokuskan soal strategi, media dan isu yang diusung dalam pendidikan politik yang dilakukan partai didalam level lokal pada masa pandemi.

Maka dari hal tersebut, penulis ingin mengisi kekosongan itu

dengan mengkaji Partai PKS dengan fokus terhadap isu dan strategi yang digunakan oleh PKS dalam memberikan pendidikan politik untuk kader dan masyarakat selama masa pandemi di Kota Bogor serta mengkaji mengenai media, metode dan isu apa yang digunakan dalam menjalankan pendidikan politik pada masa pandemi Covid-19 di Kota Bogor.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Penelitian lapangan (*Field Research*) yang juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Ide penting dari jenis penelitian ini adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan langsung tentang suatu fenomena yang terjadi. Dalam hal ini lokasi penelitian yang akan peneliti lakukan pengamatan di Kantor DPD PKS Kota Bogor. Sehubungan dengan itu, nantinya peneliti akan memaparkan bagaimana situasi dan kondisi lokasi tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video dan lain sebagainya (Poerwandari, 1998). Penelitian ini dikatakan kualitatif karena pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya, dan hasil yang diharapkan pun bukanlah berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, melainkan makna atau segi kualitas dari fenomena yang diamati.

Pendekatan pada penelitian ini yaitu studi kasus, dimana peneliti mengeksplorasi kehidupan-nyata terkait dengan konsep Pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera untuk selanjutnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat menjadi jawaban dari rumusan masalah melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan berbagai sumber informasi (Creswell, 2017).

2. Jenis Data

Tentunya di dalam sebuah penelitian diperlukan sumber data yang konkret dari lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti membagi dua sumber data.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian langsung dilapangan oleh peneliti, bentuk data ini bisa berbentuk dokumen hasil observasi di lapangan, catatan hasil wawancara dan data-data mengenai informasi peneliti (Yusuf, 2017).

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan melalui observasi kepustakaan yang berasal dari penelitian-penelitian atau buku-buku yang sudah ada (Yusuf, 2017: 144).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data penelitian. Dalam penelitian kualitatif meliputi; wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi (naskah, catatan harian, notulensi, surat-surat, gambar-gambar, foto, dan lain-lain).

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertemu muka (*face to face*), ketika seseorang, yakni pewawancara-mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian, kepada seseorang yang diwawancarai (Kerlinger, 2000). Teknik wawancara ini digunakan dengan maksud untuk memperoleh keterangan dari para informan secara mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan pandangan dan pengalaman mereka tentang pendidikan politik. Dalam penelitian ini, pengumpulan data nanti bakal dilakukan secara langsung kepada target-target narasumber yang sudah ditentukan, yaitu pengurus partai tingkat kota, kecamatan, kader partai dan masyarakat yang menjadi konstituen Partai PKS Kota Bogor.

b. Observasi

Dalam penelitian ini observasi melibatkan pencatatan maupun rekaman hasil dari penelitian yang dilakukan secara sistematis serta pengamatan dari gejala-gejala yang diteliti, seperti pengamatan secara langsung berbagai aktivitas yang dilakukan oleh subjek penelitian terutama dalam hubungannya dengan penyelenggaraan pendidikan politik. Teknik ini digunakan untuk mengungkapkan secara langsung penyelenggaraan pendidikan politik di DPD PKS Kota Bogor.

c. Dokumentasi

Teknik studi dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis dokumen-dokumen resmi yang menyangkut partai politik dan relasinya dengan masyarakat, seperti program perencanaan partai, catatan-catatan penting yang dibuat media massa, baik media elektronik maupun cetak, tentang komunikasi partai politik, budaya politik, dan partisipasi politik. Tujuan dilakukannya studi dokumentasi ini adalah untuk mengungkapkan berbagai kebijakan, program partai politik atau kegiatan yang disusun oleh partai politik terkait komunikasi politik.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data memuat penjelasan tahapan-tahapan dalam proses menganalisa data-data penelitian yang akan dilakukan. Setiap tahapan harus dijelaskan secara rinci teknisnya. Tahapan – tahapan analisis data penelitian menyesuaikan dengan jenis penelitian yang dilaksanakan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan. Dalam hal ini, Nasution menyatakan “Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang “grounded” (Sugiyono, 2018). Berdasarkan pernyataan di atas, analisis data dalam penelitian kualitatif sebelum peneliti memasuki lapangan yaitu dengan melakukan studi pendahuluan atau pra-penelitian untuk menentukan fokus permasalahan. Pada saat penelitian

berlangsung di lapangan analisis data dilakukan secara interaktif yaitu pada saat pengumpulan data berlangsung. Maka hal ini sejalan dengan model Miles and Huberman yang mengemukakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai (Sugiyono, 2018: 246). Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Berdasarkan penjelasan di atas, maka analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa komponen yaitu:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Menurut Sugiyono (2018: 249) Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Menurut Sugiyono dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya (2018: 249). Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan "*The most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan

data, maka akan memudahkan, untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Sugiyono 2018: 249).

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Menurut Sugiyono (2015: 252) bahwa kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu penjabaran data yang didapat dari observasi penelitian dan dijabarkan secara deskriptif yang sistematis, yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, bagian profil, bagian isi dan bagian akhir. Dalam penelitian ini penulis membagi penelitian ini menjadi ke dalam enam bab. Adapun susunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Ini merupakan tahap awal dari penyusunan naskah penelitian/skripsi yang berisi latar belakang, sebagai dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai apa yang ingin kita sampaikan dalam penelitian ini. Selanjutnya ada rumusan masalah yang merupakan pertanyaan penelitian yang akan dicari jawabannya. Dalam pendahuluan terdapat penjabaran mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian ini, selain itu juga terdapat manfaat sebagai penjabaran dari nilai guna yang diharapkan dari penelitian ini. Setelahnya dijabarkan 10 hasil penelitian yang memiliki kemiripan dari penelitian ini sebagai tolak ukur atas isi dan penyampaian penelitian. Selanjutnya ada kerangka teori adalah pemaparan

teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti dan menjadi rujukan untuk memahami dan menjelaskan data/informasi hasil penelitian serta jawaban atas masalah penelitian. Terdapat juga metode penelitian yang isinya terdapat jenis dan pendekatan penelitian, jenis data, teknik analisis data. Termuat juga sistematika penulisan sebagai outline proposal penelitian ini.

BAB II KERANGKA TEORI TENTANG PENDIDIKAN PARTAI POLITIK

Merupakan bagian lanjutan yang menjelaskan penjabaran teori pendidikan politik oleh partai politik berdasarkan kerangka teori yang telah dijabarkan dalam proposal penelitian.

BAB III PKS DI KOTA BOGOR

Dalam bab ini merupakan penjelasan terkait gambaran umum profil partai, pada bab ini, penulis menjabarkan mengenai profil DPP Partai Keadilan Sejahtera dan DPD di Kota Bogor

BAB IV STRATEGI PENDIDIKAN POLITIK PKS SELAMA MASA PANDEMI

Merupakan bab dimana peneliti menjelaskan mengenai prinsip dan strategi Pendidikan Politik oleh PKS yang dilakukan selama 2 tahun terakhir atau selama masa pandemi sebagai upaya peningkatan partisipasi politik di tengah masa Pandemi Covid-19.

BAB V MEDIA DAN ISU

Pada bab ini peneliti menjelaskan apa media dan isu yang digunakan oleh PKS dalam menyelenggarakan pendidikan politik selama masa pandemi. Di dalam bab ini terdapat penjelasan mengenai topik apa yang lebih dominan diantara politik kenegaraan, kebijakan negara dengan isu tentang Covid-19, sasaran serta hambatan masing-masing media dan isu yang digunakan serta tantangan yang terjadi selama menggunakan media dan metode tersebut.

BAB VI PENUTUP DAN SARAN

Bab ini meliputi simpulan, dan penutup. Selain simpulan dan kata penutup dari penelitian dalam bab ini juga akan disajikan saran untuk penelitian serupa kedepannya.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Partai Politik

Partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama (Budiarjo, 2013). Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Terdapat tidak kurang dari 80 variasi definisi tentang partai politik yang dibedakan oleh penekanan kajian, diantaranya: akar ideologi partai, partai sebagai instrumen meraih kekuasaan/pemerintahan, desain instrumen mediasi (intermediari) penting dlm mengorganisir dan menyerahkan pilihan pemilih dalam mempengaruhi tindakan pemerintah.

Definisi partai politik dari sisi akar ideologi adalah sekelompok manusia yang bersatu untuk mempromosikan kepentingan nasional melalui usaha Bersama mereka di atas prinsip-prinsip tertentu yang mereka setuju dan sepakati (Burke, 2005). Definisi partai politik sebagai instrumen meraih kekuasaan atau pemerintahan oleh Epstein yang menyebutkan bahwa partai politik adalah kelompok masyarakat terorganisir secara bebas untuk mencari jabatan publik tertentu dalam pemerintahan. Sebagai intermediary, Downs menjelaskan bahwa partai politik adalah sekelompok orang (*coalition of men*) yang berusaha mengontrol aparatur pemerintah (*governing apparatus*) dengan cara-cara legal (*legal means*). Dengan kelompok, mereka memiliki misi bersama dan dicapai dengan kerjasama. Dengan aparatur pemerintah, terdapat perlengkapan institusional, aturan, dan tenaga fisik yang menjalankan peran khusus di bagian masing-masing. Dengan aturan, adanya pengaruh yang terlegitimasi dan terinstitusionalisasi.

Asal-usul partai politik dapat dipahami dengan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan institusional, pendekatan historis dan pendekatan modernisasi. Dalam teori institusional, terdapat penekanan pada transformasi yang terjadi pada parlemen. Teori institusional melihat lahirnya partai politik dari dua arah, yaitu partai politik yang terbentuk dari dalam parlemen (intra

parlemen), dan partai politik yang lahir dari luar parlemen (ekstra parlemen). Kemunculan partai politik dari dalam parlemen berkembang dalam tiga tahap, yaitu (1) lahirnya kelompok- kelompok parlementer, (2) pembentukan panitia-panitia pemilihan lokal, dan (3) diadakannya hubungan-hubungan permanen diantara keduanya. Sementara itu, partai politik yang hadir di luar parlemen secara tipikal menghadirkan perlawanan- perlawanan ideologis terhadap elit yang berkuasa. Karakter partai yang terbentuk secara eksternal ini berusaha untuk masuk ke koridor kekuasaan dengan mengedepankan kepentingan-kepentingan kelompok yang sebelumnya disingkirkan. Kedua, teori historis. Teori ini memberi tekanan pada krisis-krisis sistemik yang berkaitan dengan proses pembangunan-bangsa. Berdasarkan pendekatan historis ini, krisis legitimasi dapat menjelaskan munculnya beberapa partai politik generasi pertama. Ketiga, teori modernisasi pembangunan politik (Pamungkas, 2011).

Beberapa ahli mengasosiasikan munculnya partai-partai politik dengan dampak- dampak industrialisasi. Dalam masyarakat modern, partai politik muncul untuk memobilisasi massa, bukan untuk mengadakan revolusi. Dari ketiga pendekatan tersebut terdapat sebuah kesepakatan yang mengatakan bahwa satu faktor penentu munculnya partai politik adalah hadirnya mobilisasi sosial, atau masuknya massa ke panggung politik. Ketika politik tidak lagi menjadi domain para elit aristokrasi, maka penting untuk menghadirkan partai politik sebagai mediator untuk menghubungkan antara masa dan negara (Pamungkas, 2011:33).

Selain itu, Pamungkas juga menjelaskan mengenai pemahaman fungsi partai politik yang berangkat dari realitas empirik dari partai politik dan berlangsung melalui proses evolusi yang panjang. Pada suatu masa boleh jadi partai politik dalam rangka menopang bekerjanya demokrasi memainkan fungsi tertentu secara menonjol, namun pada masa yang lain fungsi itu tidak dimainkan lagi karena konteks yang melingkupinya (Pamungkas, 2011:14). Terdapat 3 bagian partai politik yang masing-masing memiliki cara pemahaman fungsi partai politik, yaitu fungsi partai di elektorat, fungsi partai sebagai organisasi dan fungsi partai di pemerintahan.

Fungsi partai di elektorat menunjuk pada penampilan partai politik dalam menghubungkan individu dalam proses demokrasi, yaitu:

- a. Menyederhanakan pilihan bagi pemilih

- b. Pendidikan warga negara
- c. Membangkitkan simbol identifikasi dan loyalitas
- d. Mobilisasi rakyat untuk berpartisipasi

Pada fungsi partai sebagai organisasi, partai politik menunjuk pada fungsi-fungsi yang melibatkan partai sebagai organisasi politik, atau proses-proses dalam organisasi itu sendiri, yaitu:

- a. Rekrutmen kepemimpinan politik dan mencari pejabat pemerintah
- b. Pelatihan elit politik
- c. Pengartikulasian kepentingan politik
- d. Pengagregasian kepentingan politik

Selanjutnya pada fungsi partai di pemerintahan, partai bermain dalam pengelolaan dan penstrukturan persoalan-persoalan pemerintahan, diantaranya:

- a. Menciptakan mayoritas pemerintahan
- b. Pengorganisasian pemerintahan
- c. Implementasi tujuan kebijakan
- d. Mengorganisasikan ketidaksepakatan dan oposisi
- e. Menjamin tanggung jawab tindakan pemerintah
- f. Kontrol terhadap administrasi pemerintahan
- g. Memperkuat stabilitas pemerintahan.

Berdasarkan asal-usul serta pemahaman fungsi-fungsi tersebut, partai politik dan oposisi memiliki bagian penting dalam demokrasi modern. Pemilu membutuhkan partai politik sebagai saluran kepentingan dan rekrutmen politik.

Partai politik adalah sarana penting untuk mencapai pemerintahan yang demokratis, dengan syarat bahwa partai tersebut berada dalam sistem yang bersifat terbuka, berorientasi pada partisipan (bukan pada elit politik), serta bekerja dalam sistem pemilu yang bebas dan adil (Katz 2006). Partai politik memiliki urgensi atas demokrasi, diantaranya artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, sosialisasi, rekrutmen politik, komunikasi politik, pengelolaan kekuasaan serta sebagai sub-kultur demokrasi.

B. Pendidikan Politik

Pendidikan politik dimaknai sebagai usaha yang terencana, dengan sadar untuk memberikan penyadaran kepada warga negara yang sudah berhak

memilih. Dalam tulisan ini peneliti menggunakan teori Pendidikan politik dari Kartono (1996). Dalam pandangannya menurut Kartono pendidikan politik adalah upaya edukatif yang intensional, disengaja dan sistematis untuk membentuk individu sadar politik, dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis/moril dalam mencapai tujuan-tujuan politik. Jadi pendidikan politik itu adalah suatu proses penanaman nilai-nilai politik yang dilakukan secara sengaja, terencana, bisa bersifat formal maupun informal, dilakukan secara terus menerus dari generasi ke generasi, agar warganegara mau berpartisipasi dalam politik, serta memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab.

Dalam buku pendidikan politik, Kartono (2009: 74), mengatakan bahwa: pendidikan politik itu bukan gerakan elier atau aristokratis dengan ideologi yang melayang-layang tinggi, juga bukan berupa aktivitas yang sia-sia, juga bukan alat yang tidak efisien yang membuat sejumlah pemberontak mengalami frustrasi lebih parah akan tetapi merupakan:

- 1) Bimbingan edukatif yang terarah, bertujuan dan sistematis
- 2) Ditujukan pada pencapaian hari esok yang lebih baik
- 3) Melawan ketidakadilan, pemerintah teknokratis otoriter, tiranik atau despotik.

Betapa pentingnya pendidikan politik bagi seluruh elemen warga negara, khususnya bagi para kader dan masyarakat. Maka menjadi harapan kita semua agar pendidikan politik yang diterapkan ini bersumber pada aspirasi yang digali dari kepribadian dan kekayaan spiritual bangsa sendiri dan telah disepakati secara nasional, demi tegaknya Republik Indonesia, dan demi tercapainya tujuan-tujuan politik negara, yang pada hakikatnya merupakan pencerminan murni dari harapan dan aspirasi bangsa/rakyat Indonesia. Pendidikan politik disebut pula sebagai *political forming* atau *Bildung*. Disebut "*forming*" karena terkandung intensi untuk membentuk insan politik yang menyadari status/kedudukan politiknya di tengah masyarakat. Dan disebut "Bindung" (pembentukan atau pendidikan diri sendiri), karena istilah tersebut menyangkut aktivitas: membentuk diri sendiri, dengan kesadaran penuh dan tanggung jawab sendiri untuk menjadi insan politik (Kartono, 2009: 63).

Pendidikan politik pada hakikatnya merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa. Pendidikan macam ini tidak menonjolkan proses

kultivasi individu menjadi “intelektual politik” yang bersinggasana dalam menara gading keilmuan, atau menjadi pribadi kritis dan cerdas “yang terisolasi” dari masyarakat lingkungannya. Akan tetapi lebih menekankan relasi individu dengan individu lain, atau individu dengan masyarakatnya di tengah medan sosial; dalam satu konteks politik, dengan kaitannya pada aspek-aspek sosial-ekonomi-budaya; di tengah situasi-situasi konflik yang ditimbulkan oleh bermacam-macam perbedaan, atau oleh adanya pluriformitas (kemajemukan budaya) (Kartini Kartono, 2009: 63).

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Lanskap Kota Bogor



Gambar 1. Logo Kota Bogor (Sumber: Website Pemkot Bogor)

Kota Bogor merupakan sebuah kota di Provinsi Jawa Barat dan terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor. Kota ini hanya berjarak sekitar 60 kilometer dengan DKI Jakarta sedangkan jarak dengan Kota Bandung sekitar 120 kilometer. Sebagai wilayah penyangga ibu kota Jakarta, Kota Bogor menjadi penunjang layanan, pusat aktivitas nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata. Setelah Indonesia lepas dari belenggu penjajahan, Kota Bogor ditetapkan menjadi kota besar berdasarkan UU 16/1950. Selanjutnya pada tahun 1957, nama pemerintahan berubah menjadi Kota Praja Bogor sesuai dengan UU 1/1957. Kemudian berdasarkan UU 18/1965 dan UU 5/1974 berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor. Terakhir, dengan diterbitkannya UU 22/1999, Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor diubah lagi menjadi Kota Bogor hingga sekarang. Tanggal 3 Juni 1972, untuk pertama kalinya hari jadi Kota Bogor diperingati. Berdasar penyelidikan yang dilakukan oleh Saleh

Danasasmita tentang sejarah Bogor, DPRD Kotamadya Bogor menetapkan hari lahir Kota Bogor pada tanggal 3 Juni 1482. Penetapan tanggal itu berdasarkan peristiwa pelantikan Raja Pajajaran yang terkenal, yaitu Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Dahulu luasnya 21,56 km², namun kini Kota Bogor telah berkembang menjadi 118,50 km². Berdasarkan hasil sensus penduduk 2020, terdapat 1.043.070 orang yang tinggal di Kota Bogor. Secara administratif, Kota Bogor terdiri dari 6 wilayah kecamatan dan 68 kelurahan. Saat ini, Kota Bogor dipimpin oleh Walikota Bima Arya Sugiarto dan Wakil Wali Kota Dedie A Rachim. Kota yang sudah menapaki usia ke-539 pada tahun ini dikenal dengan sebutan Kota Hujan karena memiliki curah hujan yang tinggi. Pada masa Kolonial Belanda, Bogor dikenal dengan nama Buitenzorg yang berarti “tanpa kecemasan” atau “aman tentram”. Buitenzorg itu sendiri diambil dari salah satu nama dari spesies palem (Armani 2019).

Kota Bogor termasuk ke dalam Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Jabodetabekpunjur. Selain itu, kekhasan iklim lokal yang dimilikinya menjadikan Bogor sebagai pusat riset botani serta pertanian nasional. Pada tahun 2016, Kota Bogor berhasil menyabet gelar predikat The Most Lovable City sedunia yang diselenggarakan oleh WWF (World Wildlife Fund), mengalahkan sejumlah kota besar di dunia seperti Paris, juga Jakarta, dan Balikpapan (Purwanto, 2021).

1. Kondisi Geografis Kota Bogor

Secara geografis, Kota Bogor terletak diantara 106° 43'30" - 106° 51.00" Bujur Timur dan 6° 30'30"-6° 41'00" Lintang Selatan. Kondisi iklim di Kota Bogor suhu rata-rata tiap bulan 24,60 - 26,80 C dengan suhu terendah 19,30 - 21,50C dan suhu tertinggi 31,90 - 34,20 C. Kelembaban udara rata-rata antara 80%-86%. Kota ini berjarak lebih kurang 50 Km dari Jakarta, dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Wilayah Kecamatan Kemang, Kecamatan Bojong Gede dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Timur
2. Sebelah barat: Wilayah Kecamatan Dramaga dan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor
3. Sebelah Timur : Wilayah Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan

Ciawi Kabupaten Bogor

4. Sebelah Selatan : Wilayah Kecamatan Cijeruk dan Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.



Gambar 2. Peta Kota Bogor (Sumber: Bapenda Jawa Barat, 2018)

Luas wilayah kota Bogor 11.850 ha, terdiri atas 6 Kecamatan dan 68 Kelurahan. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2 informasi mengenai kecamatan di Kota Bogor

No.	Kecamatan	Jumlah			
		Luas (Ha)	Kel.	RW	RT
1.	Bogor Utara	1.772	8	91	408
2.	Bogor Timur	1.015	6	55	276
3.	Bogor Tengah	813	11	98	443
4.	Bogor Selatan	3.081	42	151	645
5.	Bogor Barat	3.285	16	168	647
6.	Tanah Sareal	1.884	11	100	491
Jumlah		11.850	68	663	2.910

Sumber: Bappeda Kota Bogor, 2021.

2. Kondisi Demografis Kota Bogor

a) Persebaran Jumlah Penduduk Kota Bogor

Jumlah penduduk Kota Bogor Tahun 2021 adalah **1.043.070** jiwa dengan persebaran di Kecamatan Bogor Selatan 204.030 jiwa, Kecamatan Bogor Timur 104.327 jiwa, Kecamatan Bogor Utara 186.724 jiwa, Kecamatan Bogor Tengah 96.258 jiwa, Kecamatan Bogor Barat 223.637 jiwa, dan Kecamatan Tanah Sareal 218.094 jiwa. Komposisi penduduk Laki-laki di Kota Bogor sebanyak 533.744 jiwa dan Perempuan sebanyak 518.585 jiwa. Dengan luas wilayah 11.850 ha, kepadatan penduduk Kota Bogor Tahun 2021 adalah 85 jiwa/ha.

b) Kondisi Keagamaan Kota Bogor

Dalam hal agama, Kota Bogor didominasi oleh agama Islam dengan 969.343 jiwa, lalu Kristen 90.885 jiwa, Katolik 55.890 jiwa, Hindu 1.635 jiwa, Buddha 13.138 jiwa dan lainnya 253 jiwa, terbukti dengan adanya data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (Aulia, 2022). Berdasarkan hasil observasi di BPS Jabar diperoleh pula data tentang jumlah sarana ibadah di Kota Bogor sebagai berikut:

- a. Masjid : 753 buah
- b. Mushola : 358 buah
- c. Gereja Kristen : 24 buah
- d. Gereja Katolik : 7 buah
- e. Wihara : 20 Buah
- f. Pura : 3 buah

c) Struktur Sosial dan Ekonomi Kota Bogor

Kedudukan topografis Kota Bogor ditengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor serta lokasinya yang dekat dengan Ibukota Negara merupakan potensi yang strategis untuk perkembangan dan pertumbuhan kegiatan ekonomi. Adanya Kebun Raya yang didalamnya terdapat Istana Bogor di Pusat Kota merupakan tujuan wisata serta kedudukan Kota Bogor diantara jalur tujuan wisata Puncak–Cianjur juga merupakan potensi yang strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Pembangunan didaerah ini

lebih diarahkan pada pemerataan dan pertumbuhan ekonomi dengan memprioritaskan pembangunan sektor industri pelayanan yang ditunjang oleh sektor pertanian.

Tabel 3. Mata pencaharian masyarakat Kota Bogor pada tahun 2015.

Lapangan Kerja/Industrial Origin	2015		Jumlah/Total
	Laki- laki/Male	Perempuan/ Female	
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perburuan, Perikanan/Agriculture, Forestry and hunting, and Fishing	4 138	843	4 981
2. Industri Pengolahan/Manufacturi ng	44 330	14086	58 416
3. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel/Wholesale, Retail, Restaurants, and Hotels	82 701	38 101	120 802
4. Jasa Kemasyarakatan/Social Services	74 649	44 477	119 126
5. Lainnya/Others	87 389	10 269	97 658
Jumlah/Total	293 207	107 776	400 983

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bogor 2016.

Dilihat dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang cukup diberdayakan di Kota Bogor dengan serapan tenaga kerja hingga 120.802, karena selain sebagai sumber penerimaan daerah, serta pengembangan dan pelestarian seni budaya Kota Bogor, sektor Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel juga membangkitkan sektor perekonomian masyarakat Kota. Selain itu dari sektor jasa kemasyarakatan juga menjadi pekerjaan yang banyak diminati di Kota Bogor dengan 119.126 tenaga kerja.

d) Struktur Politik dan Pemerintahan Kota Bogor

Kota Bogor dipimpin oleh Walikota Bima Arya dan Wakil Walikota Dedie A Rachim. Ini merupakan periode kedua Bima Arya menjadi Wali Kota di Kota Bogor, dibelakangnya Bima Arya dibantu dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah Kota Bogor yang mengalami penurunan jumlah pegawai dari tahun sebelumnya sebanyak 6.548 pegawai menjadi sebanyak 6.401 pegawai Laki-laki dan Perempuan di akhir tahun 2021.

Secara komposisi sebanyak 3.051 pegawai Laki-laki dan 3.350 pegawai Perempuan kondisi di akhir tahun 2021. Sejak pelantikan pada tahun 2019, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum mengalami perubahan jumlah dan komposisi anggota. Dari sejumlah 50 anggota, 39 orang berjenis kelamin Laki-laki dan sisanya adalah Perempuan. Dengan komposisi terbanyak adalah dari Partai Keadilan Sejahtera, kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Gerakan Indonesia Raya. Sedangkan Partai Nasdem, Hanura dan PBB masing-masing memiliki 1 orang perwakilan dalam keanggotaan DPRD periode 2019-2024 tersebut. Sejak 26 September 2019 DPRD Kota Bogor di Ketuai oleh Atang Trisnanto (PKS), Wakil Ketua I Jenal Mutaqin (Gerindra), Wakil Ketua II Dadang Danubrata (PDI-P) dan Wakil Ketua III Eka Wardhana (Golkar).

B. PKS di Kota Bogor

1. PKS dalam Perpolitikan Nasional

Cikal bakal PKS berasal dari gerakan dakwah para mahasiswa dan mahasiswi di kampus-kampus luar negeri maupun tanah air. Perjalanan dakwah para aktivis kampus dikenal sebutan gerakan tarbiyah di Indonesia. Setelah sukses menjadi gerakan dakwah kampus dan di masyarakat, gerakan tarbiyah mulai mengenal jati dirinya dan mencoba mengundi nasib di kancah politik. Lahirlah Partai Keadilan (PK) pada 9 Agustus 1998 sebagai cikal bakal dari Partai Keadilan Sejahtera (berasimilasi jadi PKS pada 20 April 2002/9 Jumadil Ula 1423 Hijriyah).



Gambar 3. Logo Partai Keadilan 1998–2003 (Sumber: Archive Wikipedia, 2019)

Pendiri PK kebanyakan memang dari kalangan anak muda aktivis masjid kampus, sehingga wajar bila dimasukkan kedalam kotak modernis. Namun bila kita perhatikan lebih cermat, sejumlah pendiri PK jelas-jelas berakar dari kalangan tradisional. Seperti, Salim Segaf al Jufri tercatat masih cucu pendiri Al Khairat yang cukup dominan di wilayah Indonesia bagian Timur, KH Rahmat Syafi'i tergolong murid KH. Abdullah Syafi'i (pendiri Asy Syafi'iyah dari Jakarta), Ahmad Heryawan adalah kader Persatuan Umat Islam (PUI), Daud Rasyid Sitorus berasal dari lingkungan Jamaah Al Washliyah di Sumatera Utara. Semuanya tercatat sebagai Dewan Pendiri PK. Terlihat sejumlah nama yang berakar tradisional kuat, seperti H.M. Nasir Zein (Betawi), Mohammad Idris Abdus Somad (Sunda), Ahzami Samiun Jazuli (Jawa), Iskan Lubis (Sumatera), dan lain-lain (Fanani, 2016).

Karena itulah PKS sulit dikategorikan sebagai partai tradisional atau modern. Pada tahun 1998 Partai Keadilan mendeklarasikan dirinya di masjid Al Azhar Jakarta. Tahun 1999, pemilu pertama pasca reformasi, Partai Keadilan memperoleh suara 1,4 juta pemilih. DPR RI 7 kursi, DPRD Provinsi dan Kabupaten sebanyak 105 kursi, serta satu orang menteri di pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gusdur). Pada 21 Mei 2000, Hidayat Nur Wahid terpilih sebagai Presiden PK dalam Munas I PK di hotel Bumi Wiyata, Depok menggantikan Nur Mahmudi Ismail yang menjadi Menteri Kehutanan. Namun langkah PK menyemai benih dakwah di lahan politik terbentur ketentuan Undang-Undang Pemilihan Umum electoral threshold yang mengakibatkan PK tidak bisa ikut dalam Pemilu 2004.

Didorong kuatnya keinginan untuk ikut berkontribusi bagi negeri tercinta, 17 April 2003 Musyawarah Majelis Syuro XII Partai Keadilan merekomendasikan untuk bergabung dengan PKS. Tanggal 20 April 2003 dilakukan deklarasi Partai Keadilan Sejahtera di Silang Monas Jakarta, dihadiri 40.000 masa. DPP PKS dinyatakan lulus verifikasi oleh Depkeham pada 4 Juni 2003, dan satu bulan kemudian PK resmi bergabung dengan PKS. Pemilu 2004 PKS mendapatkan 8,4 juta suara.



Gambar 4. Logo Partai Keadilan 2013-2020 (Sumber: Komisi Pemilihan Umum, 2013).

Dengan terpilihnya Dr. Hidayat Nurwahid sebagai ketua MPR RI, maka posisi Presiden PKS digantikan oleh Ir. Tifatul Sembiring sebagai bentuk budaya reformis: pejabat publik jangan jadi pemimpin parpol. **Visi** dari Partai ini adalah menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima). **Misi** Partai adalah menjadikan Partai sebagai sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila (PKS 2021).

2. DPD PKS Kota Bogor

Sejalan dengan dinamika ditingkat nasional maupun provinsi, PKS di Kota Bogor pun mengalami dinamika serupa baik pergantian nama dari Partai Keadilan menjadi Partai Keadilan Sejahtera, seiring dengan perkembangan partai di tiap kalender Pileg tak ayal adanya

perubahan struktur maupun kiprah kelembagaan serta kader yang menjadi anggota legislatif. PK Kota Bogor dilantik dan diresmikan pada tanggal 20 September 1998. Dinamika Partai Keadilan menjelang pemilu 1999 sejalan dengan kebijakan partai secara nasional, yang antara lain meliputi proses pengenalan partai dilakukan melalui *Direct Selling* (pengenalan partai dari rumah ke rumah), bakti sosial maupun Training Orientasi Pengenalan (TOP) Partai bagi para tokoh masyarakat. Walau memiliki sistem pengenalan khusus, prestasi PK di awal pembentukan tidak cukup baik, akibatnya UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas minimum keikutsertaan parpol pada pemilu selanjutnya (electoral threshold) dua persen, maka PK harus merubah namanya untuk dapat ikut kembali di Pemilu berikutnya.

Pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Kehakiman dan HAM (Depkeham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota). Sehari kemudian, PK bergabung dengan PKS dan dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya. Sehubungan dengan penggabungan ini maka PK (Partai Keadilan) resmi berubah nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera), salah satu keunggulan PK yang saat ini juga menjadi keunggulan PKS adalah adanya mekanisme syuro yang menjadi kunci penetapan kebijakan partai. Syuro sendiri adalah sebuah proses yang dilakukan oleh sebuah majelis atau perkumpulan dari sebuah organisasi, partai maupun masyarakat yang anggotanya dipilih untuk menentukan keputusan atas suatu hal, syuro tidak menghendaki suara mayoritas, melainkan harus keseluruhan anggota majelis dan aspirasi yang diwakilinya. Jika masih ada anggota yang merasa keberatan dengan keputusan mayoritas, maka berarti mufakat belum tercapai, jika hal ini terjadi maka kewajiban pemimpinlah untuk bertindak tegas, mengkolaborasikan pendapat mayoritas dan minoritas meskipun harus menyisihkan sebagian pendapat masing-masing. Menjelang pemilu 2004 keterlibatan tokoh masyarakat yang didorong oleh semangat membesarkan partai dakwah ini begitu besar. Kegiatan partai dan pertumbuhan struktur partai berjalan dengan cepat. Hal Ini terbukti

dengan banyaknya tokoh masyarakat yang bergabung dalam kepengurusan maupun program kerja-kerja partai.

Karena kerja keras dan keterlibatan berbagai komponen masyarakat terutama tokoh agama sehingga pada pileg tahun 2004 PK Kota Bogor yang telah berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperoleh suara sebesar 90.134 suara, jumlah tersebut terbanyak nomor dua di Kota Bogor setelah Partai Golkar. Hal tersebut dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 4. Perolehan Suara Parpol DPRD Kota Bogor, 2004.

No.	Partai Politik	Dapil 1			Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Dapil 5	Jumlah Seluruh Suara Sah
		Botim	Boteng	Jumlah	Bout	Tansa	Bobar	Bosel	
1.	PNI	91	102	193	151	140	189	160	833
2.	PBSD	203	147	350	538	522	228	-	1638
3.	PBB	686	628	1314	1172	4003	2025	848	9362
4.	Merdeka	228	60	288	592	84	670	166	1800
5.	PPP	4234	3736	7970	5580	10964	6534	6557	37.605
6.	PPDK	170	141	311	154	255	274	74	1068
7.	PIIB	52	198	250	249	284	294	220	1297
8.	PNBK	94	427	521	254	417	495	148	1835
9.	Demokrat	6783	7485	14268	9039	8546	10854	10337	53.044
10.	PKPI	218	791	1009	442	472	993	366	3282
11.	PPDI	244	560	298	509	392	316	554	2313
12.	PPNUI	2751	211	2962	454	514	697	956	5593
13.	PAN	2926	4373	7299	5263	5065	7701	6363	31691
14.	PKPB	933	1769	2702	2030	1515	1557	2181	9985
15.	PKB	505	1481	1936	1177	1148	2538	785	7634
16.	PKS	7266	11568	18834	16301	17679	23734	13586	90134
17.	PBR	1498	581	2079	1066	2135	2299	1481	9060
18.	PDIP	6141	8299	14640	8674	8125	14012	15007	60858
19.	PDS	2905	3682	6587	2465	2095	2096	3702	16945
20.	GOLKAR	6548	12534	19082	19890	19676	27644	18894	105186
21.	PATRIOT	942	392	1334	326	358	648	658	3324
22.	PSI	103	190	293	163	233	384	422	1495
23.	PPD	190	146	336	154	110	223	1067	1890
24.	PELOPOR	204	395	599	332	265	656	1188	3040
	Jumlah	45.987	59580	105567	76764	85114	107737	85730	460912

Sumber: Slideshow KPU, 2004.

Pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2004 diikuti oleh 24 Partai Politik peserta pemilu, dan yang berhasil meraih kursi di DPRD Kota Bogor sebanyak 10 Partai Politik yakni Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Damai Sejahtera (PDS), yang selanjutnya menjadi 7 fraksi. Periode tahun 2004 - 2009 DPRD Kota Bogor diketuai oleh TB. Tatang Muchtar (Partai Golkar), dengan para wakil Ketua, masing-masing HR. Lismo Handoko (PDI Perjuangan) dan Iwan Suryawan (Partai Keadilan Sejahtera).

Pada pemilu 2009 Partai Keadilan Sejahtera Kota Bogor berhasil menempatkan 7 anggota legislatif di DPRD Kota Bogor. Mereka adalah H. Najamudin, M.Pd yang berasal dari Dapil V, Yasir Arafat Liputo, S.Sos.I dari Dapil III, Ir. Yusuf Dardiri dari Dapil II, Ani Sumarni, SP dari Dapil III, Dadang Ruhiyana dari Dapil I, Jajat Sudrajat, Lc, MA dari Dapil IV serta Ir. Muaz HD dari Dapil III.

Namun, sukses yang mereka raih periode sebelumnya tidak berlanjut di Pemilu 2014. Karena di tahun tersebut partai ini berada di urutan keempat. Menurut Direktur Riset LSI, Kusrido Ambardi menyebutkan ada dua faktor yang menyebabkan partai ini mengalami penurunan tajam dari jumlah perolehan suara. Yakni, isu korupsi yang sempat dialami mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq yang terlibat dalam kasus suap impor daging sapi di Kementerian Pertanian (Firdaus, 2004). Tak hanya itu, Ambardi menilai raihan yang ditorehkan partai pimpinan Anis Matta tersebut sudah mencapai limitnya saat mengikuti Pemilu 2004 dan 2009 lalu. Hasilnya terjadi penurunan jumlah suara sehingga PKS pada periode itu hanya mendapatkan 5 kursi di DPRD Kota Bogor, mereka adalah Adityawarman Adil S.Si, Najamudin M.Pd.I, Jajat Sudrajat, Abuzar SE dan Teguh Rihananto, S.AP.

Penurunan jumlah suara pada pemilu 2014 ternyata memicu kebangkitan PKS, yang mana pada periode selanjutnya tepatnya pada pemilu 2019, PKS memperoleh perolehan suara terbanyak pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 di Kota Bogor. PKS menguasai 10 kursi

di DPRD Kota Bogor atau naik dua kali lipat pada Pileg 2014 yang memperoleh lima kursi. Berdasarkan berita acara rapat pleno penghitungan suara tingkat Kota Bogor, dari total 636.173 pemilih Kota Bogor, sebanyak 103.890 orang memberikan suaranya untuk PKS. Perolehan suara PKS menggeser PDI Perjuangan (PDIP) yang pada Pileg 2014 lalu meraih suara terbanyak dan pada saat ini harus puas di peringkat ketiga dengan raihan 84.774 suara, di bawah Gerindra yang mendapat 99.090 suara. 10 anggota legislatif dari PKS tersebut diantaranya Adityawarman Adil, Anna Mariam Fadhilah, Atang Trisnanto, Sri Kusnaeni, Mardiyanto, M Dody Hikmawan, Angga Alan Surawijaya, Karnain Asyhar, dan Muaz HD.

3. Struktur Kepengurusan DPD PKS Kota Bogor

Struktur kepengurusan PKS Kota Bogor adalah orang-orang yang diberi amanah oleh seluruh kader yang berada di seluruh DPC (tingkat kecamatan) PKS yang ada di Kota Bogor melalui RMD (Rapat Musyawarah Daerah) Kota Bogor dengan masa jabatan selama 5 tahun ke depan.



Gambar 6. Pelantikan Pengurus PKS Kota Bogor, 29 Desember 2020 (Sumber: pks.id, 2020)

Dalam sebuah RMD (Rapat Musyawarah Daerah) pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2020, di Kantor DPD PKS Kota Bogor, melalui surat yang dibacakan oleh Ade Suherman selaku Sekretaris Badan Pembinaan Wilayah Banten Jakarta Jawa Barat (BPW Banjabar), PKS mengamanahkan delapan kader terbaik PKS Kota Bogor untuk menempati posisi DPTD PKS Kota Bogor yang terdiri dari.

Tabel 5. Daftar DPTD (Dewan Pimpinan Tingkat Daerah) DPP PKS Kota Bogor.

No.	Nama	Jabatan
1.	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si	Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD)
2.	Angga Alan Surawijaya, S.Pi, M.Si	Sekretaris MPD
3.	H. Atang Trisnanto, S.Hut, M.Si	Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD)
4.	Dedi Mulyono, S.P, M.Si	Sekretaris DPD
5.	Adityawarman Adil, S.Si, M.Si	Bendahara DPD
6.	H.Diar Shiddiq, S.P, M.Si	Kaderisasi DPD
7.	H.Yasir A. Liputo, S.Sos.I	Ketua Dewan Etik Daerah (DED)
8.	H. M. Dody Hikmawan, SE	Sekretaris DED

Sumber: Dokumen DPD PKS Kota Bogor, 2021.

Struktur ini dipilih berdasarkan voting yang dilakukan seluruh kader inti di DPD PKS Kota Bogor dan telah di setujui oleh seluruh kader. Berdasarkan data diatas, Karnain Asyhar yang juga merupakan anggota legislatif DPRD Kota Bogor secara struktur mengemban amanah tertinggi sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Daerah, lalu Atang Trisnanto yang

juga menjadi Ketua DPRD Kota Bogor ini terpilih menjadi Ketua DPD PKS Kota Bogor untuk periode 2020-2025. Dengan struktur tersebut berarti Atang Trisnanto yang pernah menjadi salah satu staf ahli Menteri Pertanian 2009-2014, Suswono itu sudah mengemban tugas sebagai Ketua PKS Kota Bogor selama dua periode setelah sebelumnya pada periode 2015-2020 juga terpilih sebagai Ketua PKS Kota Bogor secara aklamasi menggantikan Jajat Sudrajat.

Struktur ini diharapkan menjadi salah satu kekuatan PKS guna menyongsong Pemilu serentak pada tahun 2024 mendatang karena seperti yang telah diketahui bahwa Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kota Bogor telah menentukan dua nama bakal calon Wali Kota Bogor periode 2024-2029, yakni Atang Trisnanto dan Adityawarman Adil. Ketua Majelis Pertimbangan Daerah PKS Kota Bogor Karnain Asyhar mengatakan dua nama tersebut merupakan kader terbaik, sebagaimana hasil Rapat Kerja Daerah PKS Kota Bogor pada 28 Maret 2022.

BAB IV

STRATEGI PENDIDIKAN POLITIK PKS SELAMA MASA PANDEMI

A. Strategi Rekrutmen Kader PKS Kota Bogor

Dr. Kartini Kartono yang mengidentifikasi bahwa pendidikan politik adalah upaya edukatif yang intensional, disengaja dan sistematis untuk membentuk individu sadar politik dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis/moril dalam mencapai tujuan-tujuan politik. Teori tersebut diimplementasikan oleh PKS yang menggunakan sistem pendidikan politik yang berbeda di Indonesia, hal tersebut berangkat dari sistem perekrutan dan pembinaan yang ada.

Sebelum kepada pembahasan mengenai strategi dan pola pembinaan kader oleh PKS selama masa pandemi Covid-19, kita harus mengenal dulu sistem keanggotaan partai. Dalam AD/ART PKS tahun 2021, pada BAB IV mengenai Anggota Partai di pasal 10, disebutkan bahwa anggota Partai terdiri atas:

- Anggota Pendukung;
 - Anggota Pemula
 - Anggota Siaga
- Anggota Penggerak;
 - Anggota Muda
 - Anggota Pratama
- Anggota Pelopor.
 - Anggota Madya;
 - Anggota Dewasa;
 - Anggota Utama.

PKS memiliki anggota yang terbina dan yang tidak terbina. Anggota yang terbina adalah anggota yang telah melaksanakan sistem Unit Pembinaan

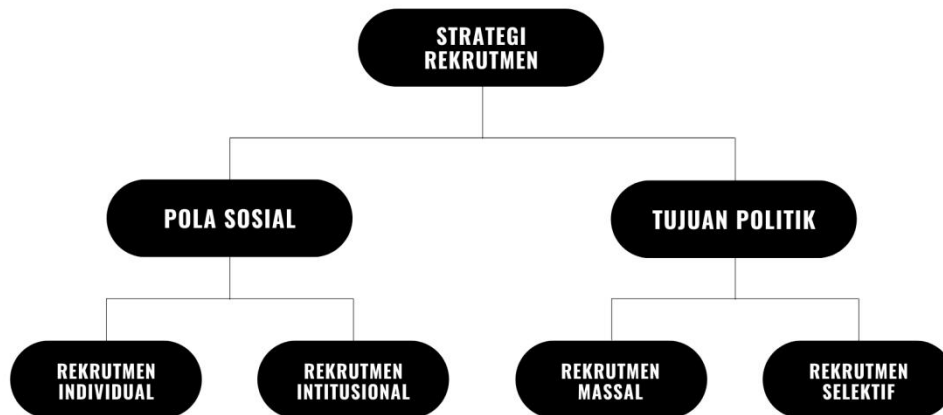
Anggota yang rutin, sebaliknya anggota yang tidak terbina adalah masyarakat yang terjaring dalam pendidikan politik PKS tetapi tidak mengikuti UPA, hal ini dijelaskan dalam wawancara:

“Yang jelas, di PKS ada namanya anggota yang terbina dan belum, jika berbicara masyarakat secara luas maka kita asumsikan masyarakat yang belum terbina, terbina yang dimaksud itu sendiri adalah mereka yang telah mengikuti UPA (Unit Pembinaan Anggota), nah kalo yang tidak terbina berarti kita asumsikan masyarakat umum yang sempat atau telah mengikuti pendidikan politik bersama PKS di Kota Bogor.” (Wawancara: Erry Nugroho, Kader PKS Kota Bogor, 13 Mei 2022).

PKS mengenal sistem Unit Pembinaan Anggota, yang merupakan sistem pembinaan dan perekrutan untuk anggota yang sifatnya wajib bagi para pengurus, kader maupun anggota. Sistem pendidikan ini dilakukan dalam rentang waktu tertentu sehingga terjadwal dan rutin. Dalam UPA, kader PKS diajarkan untuk melakukan kegiatan yang bersifat rohani dan jasmani. Namun, lebih dari itu anggota selama masuk dalam kegiatan UPA juga dipastikan kegiatannya dalam kemasyarakatan sebagai bentuk *personal branding* di masyarakat hal tersebut juga menjadi salah satu edukasi politik didalam masyarakat agar PKS senantiasa berkontribusi dalam setiap lapisan masyarakat melalui UPA.

Dalam pengetahuan kepartaian, setiap anggota yang tergabung dalam UPA wajib membaca dan memahami buletin yang biasanya disebar oleh Fraksi PKS di Kota Bogor untuk bahan komunikasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat. Meski demikian, sebagai partai kader PKS juga memiliki kurikulum khusus yang menyangkut kaderisasi yang didalamnya menyangkut berbagai hal mengenai pandangan kepartaian yang harus diikuti dan dipelajari oleh setiap kader PKS yang telah direkrut. Dalam proses rekrutmen kader politik, PKS menggunakan modus operandi *Jamaah Tarbiyah* untuk memperbesar peluang mendapatkan kader baru.

Gambar 7. Diagram strategi rekrutmen PKS.



Berdasarkan gambar diatas, PKS memiliki 2 jenis strategi rekrutmen. Berdasarkan pola sosial, PKS memakai dua strategi dalam merekrut kader baru yaitu pola rekrutmen individual dan pola rekrutmen intitusional.

1) Rekrutmen Individual

Merupakan bentuk rekrutmen dengan pola pendekatan orang per-orang, meliputi komunikasi personal secara langsung. Bagi PKS, daripada mendekati orang-orang yang belum dikenal, strategi ini dimulai dengan mengajak calon-calon kader potensial di lingkungan terdekat kader seperti keluarga, teman kolega kerja dan tetangga. Dengan kata lain, rekrutmen PKS dibangun diatas relasi sosial yang telah ada sambil pada saat yang sama menumbuhkan semacam solidaritas baru berdasarkan kepercayaan yang sama, serta komitmen dan loyalitas yang kuat (Wickham: 2002: 130-131). Calon-calon kader yang akan direkrut tersebut akan diajak untuk berpartisipasi dalam serangkaian forum keagamaan dan pelatihan yang diorganisir oleh PKS seperti *usrah* (keluarga) atau *holaqoh* (kelompok studi terbatas) atau *liqo* (pertemuan mingguan), *rihlah* (rekreasi), *mukhayyam* (camping), *daurah* (pelatihan intelektual), *nadwah* (seminar) dan seterusnya. Harapannya adalah setiap peserta baru akan saling mengenal (*ta'aruf*), memahami (*tafahum*) dan mendukung (*tafaul*). Kegiatan-kegiatan terorganisir secara sistematis ini dilakukan secara rutin, dengan harapan bahwa peserta-peserta baru bisa memiliki nilai dan pemahaman yang sama (al-Banna, 1979).

2) Rekrutmen Institusional

PKS berafiliasi dengan berbagai organisasi sayap yang berstatus formal atau tidak formal, sehingga partai dapat memanfaatkan institusi-institusi ini untuk meraup kader potensial. Rekrutmen jenis ini juga bisa dilakukan melalui berbagai kegiatan yang lain, seperti majelis ta'lim, sekolah ibu, studi intensif, kegiatan Ramadhan, pelatihan, baksos, santunan dan kegiatan-kegiatan yang lain.

Sementara itu, selain dilihat dari pola dilihat dari sisi tujuan politik strategi rekrutmen kader yang dilakukan PKS dapat dibagi ke dalam dua kategori. Yakni Rekrutmen massal dan rekrutmen selektif.

1) Rekrutmen Massal

Rekrutmen jenis ini ditujukan untuk memobilisasi sebanyak mungkin orang, terlepas dari suku, ras, dan jenis kelamin untuk sudi menjadi anggota, simpatisan dan sukarelawan PKS. Mereka diharapkan bersedia terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial dan politik yang diorganisir oleh partai. Mekanisme rekrutmen kader semacam ini jelas merupakan karakter dasar partai politik seperti PKS yang mementingkan kuantitas dukungan dari warga sebagai tiket untuk memenangkan Pemilu. Titik tekan pola rekrutmen ini adalah dari segi jumlah. Kalaupun toh tidak bersedia menjadi kader aktif, setidaknya orang-orang bias simpatik terhadap agenda dan perjuangan PKS.

2) Rekrutmen Selektif

Pola rekrutmen yang bertujuan untuk mendaftarkan kader-kader potensial melalui mekanisme rekrutmen yang selektif. Sebagai partai kader yang memiliki standar rekrutmen yang ketat, PKS kemudian akan mewajibkan para kadernya terlibat aktif dalam serangkaian pelatihan intensif. Pelatihan ini dikemas secara berjenjang atau hierarkis (*murhalah*), yang mencakup proses pembelajaran (*ta'lim*), mengasah kemampuan organisasi (*tandzim*), pengembangan karakter dan internalisasi ajaran Islam (*taqwim*), dan evaluasi (*taqwim*). Singkat kata, proses kaderisasi di PKS yang menggunakan sistem hierarkis tersebut, dapat dibagi dalam tiga tingkatan pelatihan yang berakhir pada tingkat pelopor, yang memiliki keahlian dakwah secara paripurna (Edward, 2006).

Tabel 6. Daftar Jenjang Kaderisasi PKS

Jenis	Sub-Jenis
Kader Pendukung (Pemula)	Pemula (Pemula Terdaftar)
	Siaga (Pemula Terbina)
Kader Penggerak	Muda
	Pratama
Kader Pelopor	Madya
	Dewasa
	Utama

Sumber: AD/ART PKS, 2019.

Proses kaderisasi yang berjenjang menunjukkan bahwa PKS menggunakan model organisasi Islamis yang berbasis kohesivitas intensif, bimbingan persuasif dan keselarasan dan kebersamaan yang menciptakan harmoni. (Muhtadi, 2012) Pada titik inilah, baiat menjadi fase krusial untuk menjaga kode- kode kepercayaan dan mempererat hubungan antarkader. Demikian pula, jenjang kaderisasi dan keanggotaan partai juga penting untuk memastikan sistem stelsel aktif berbasis group and grid berjalan efektif, lalu tiga tingkat tertinggi, yaitu ahli, dewasa, dan madya, disebut sebagai kader pelopor yang memiliki hak suara dalam pemilihan anggota Majelis Syuro. Kader pelopor juga memiliki hak untuk menduduki posisi-posisi strategis dalam kepengurusan PKS termasuk di DPD (Muhtadi, 2012: 174).

Dalam sumpahnya sebagai anggota PKS, seorang kader harus mengucapkan baiat secara lengkap dengan membaca dua kalimat syahadat. Dengan demikian, baiat secara Islam dan kewajiban mengikuti *liqo* atau pengajian membuat non Muslim tidak mungkin menjadi kader PKS. Namun sesuai hasil Munas tahun 2010 di Jakarta, PKS membedakan antara kader dan anggota. Kader adalah anggota yang terikat oleh sistem kaderisasi yang berbasis keislaman. Sementara anggota adalah semua warga negara Indonesia yang terikat penuh kepada organisasi. Anggota ini bersifat lebih umum dan terbuka bagi siapa pun dari golongan serta agama mana pun. Secara garis

besar, *liqo* dibedakan menjadi dua. *Liqo* jenis pertama dibina oleh *murabbi*. Pesertanya adalah kader pemula dan *muayyid* (kader muda). Kader *muayyid* yang berprestasi dan memiliki loyalitas tinggi bisa diangkat menjadi seorang *murabbi*. Kader *muayyid* yang lulus dengan baik akan mengikuti kegiatan muayasah atau kajian matrikulasi. Jika lulus, maka kader tersebut akan diminta melakukan Sumpah Setia Kader Inti Partai. Setelah dibaiat kader ini akan mendapatkan *liqo* khusus yang disebut *liqo usari* yang wajib diikuti kader *muntasib* (kader madya), *muntazhim* (kader dewasa) dan ahli. Pembina *liqo usari* disebut *naqib* (Zaidi, 2007).

Proses kaderisasi yang berjenjang tersebut diharapkan membentuk komitmen total dan loyalitas anggota terhadap partai. Tokoh PKS berpengaruh lainnya Zulkieflimansyah (2011), secara terbuka mengakui bahwa sistem kaderisasi di PKS memiliki banyak kemiripan dengan partai komunis yang bersifat stelsel aktif, hierarkis, dan meniscayakan loyalitas dan komitmen penuh terhadap garis kebijakan partai. Dia menyebut proses dan sistem kaderisasi PKS sebagai "partai komunis dengan cita rasa ideologi Islam." Deskripsi kaderisasi ini dapat ditemukan di belasan buku yang diterbitkan internal PKS berkaitan dengan kurikulum dan materi pengkaderan dari tiap-tiap jenjang. Buku-buku pelatihan yang dipublikasikan secara luas tersebut berisi panduan buat kader dan *murabbi* sekaligus. Manajemen kaderisasi juga tertata rapi, baik terkait daftar kader di tiap-tiap jenjang dan *murabbi* di setiap wilayah (Muhtadi 2012: 176).

B. Strategi PKS dalam Melakukan Pendidikan Politik Kemasyarakatan

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan program kampanye dalam kurun waktu tertentu, mengkoordinasi tim kerja, memiliki tema, faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip untuk melaksanakan gagasan strategis secara rasional dan dapat dilaksanakan melalui suatu taktik program kampanye Public Relations (PR) secara efektif serta efisien (Schraw, 1996) . Arti strategi dalam pengertian umum adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau tercapainya suatu tujuan termasuk politik. Dengan demikian kata strategi tidak hanya menjadi monopoli para jenderal atau bidang militer saja, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan.

Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu yang menggunakan dan mengembangkan kekuatan-kekuatan (ideologi, politik, ekonomi, sosbud dan hankam) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah jalan saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Strategi dapat diterjemahkan sebagai sebuah pola/perencanaan yang menggabungkan tujuan organisasi, kebijakan-kebijakan, dan rangkaian aksi yang terpadu. Dalam menyusun strategi komunikasi meliputi komunikator, pesan, komunikan, media, dan umpan balik.

Pada pembekalan pendidikan politik masyarakat, strategi agar masyarakat tertarik berpartisipasi dalam pendidikan politik adalah menggunakan pola komunikasi politik yang mudah diterima, hal tersebut dipertimbangkan karena PKS ingin menjaring seluruh elemen masyarakat, hingga masyarakat kalangan bawah sekalipun, menurut Ketua DPC PKS Tanah Sareal, Erry Nugroho, pemilih PKS rata-rata cenderung masyarakat golongan bawah, dengan kondisi tersebut PKS mempertimbangkan mengenai bagaimana PKS dapat hadir ditengah masyarakat golongan tersebut. Bagi PKS, bahasa komunikasi yang paling mudah untuk dicerna dalam memberikan pemahaman politik ditengah masyarakat dalam hal ini masyarakat menengah kebawah adalah ketika masyarakat merasakan kehadiran sebuah partai di lingkungan mereka, bagi DPD PKS Kota Bogor, hal itu merupakan satu poin pendidikan bahwa PKS mampu memberikan sesuatu untuk masyarakat, hal tersebut dijelaskan dalam wawancara:

“Masyarakat umum itu pendidikan politik yang kita lakukan mudah kok, gak rumit gak sulit, kita lebih suka di PKS itu berkomunikasi dengan Bahasa yang mudah diterima, nah bahasa yang mudah diterima itu adalah bahwa masyarakat kita itu tidak semua berpendidikan tinggi, apalagi rata-rata pemilih PKS itu cenderung mengarah ke masyarakat menengah ke bawah, dengan kondisi tersebut bagi kami, bahasa yang paling mudah dicerna bagi kita adalah bagaimana mereka merasakan kehadiran partai, bagi PKS itu adalah satu poin pendidikan, bahwa PKS mampu memberikan sesuatu kepada masyarakat dan imbal baliknya masyarakat mengakui manfaat atau keberadaan PKS sebagai partai politik.”
(Wawancara: Erry Nugroho, Kader PKS Kota Bogor, 13 Mei 2022).

Dapat diasumsikan bahwa bahasa komunikasi yang paling mudah untuk dicerna dalam memberikan pemahaman politik ditengah masyarakat adalah berbentuk pelayanan masyarakat atau sosial. Hal tersebut menurut pula dikatakan oleh Pak Untung yang bekerja sebagai wartawan di Radar Bogor, salah satu surat kabar paling berpengaruh di Kota Bogor, dirinya mengatakan bahwa keberadaan program-program bantuan atau pelayanan masyarakat yang dimiliki PKS merupakan salah satu ciri komunikasi yang mudah untuk menggaet dukungan dan tentunya pendidikan politik.

“Dulu memang PKS itu paling rajin kirim dokumentasi laporan, atau undangan untuk publikasi kegiatannya lah gitu, Cuma sekarang mereka memang fokusnya pelayanan langsung ke masyarakat kaya kemarin waktu datang ke warga gusuran proyek rel kereta, lalu waktu kemarin varian Delta (Virus Corona) mereka bagi-bagi bantuan oksigen, jarang hubungi wartawan kalo gitu biasanya saya minta ke Budi (Humas Fraksi PKS Kota Bogor) untuk monitor acara, tapi beliau kan kadang sibuk, pokoknya wartawan di Pokja ini bukan lagi backbone dari usaha mencari suara dari mereka lagi.” (Wawancara: Untung, Wartawan Radar Bogor, 19 Mei 2022).

Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh Rizky, wartawan yang cukup sering mengikuti berbagai acara pendidikan politik PKS dari sebelum pandemi dan sebelum pandemi, wartawan dari portal berita online Bogor Daily ini mengatakan bahwa kunci dari kuatnya PKS di Kota Bogor adalah dari bagaimana PKS memberdayakan *grassroot* yang militan untuk berbaur dengan masyarakat dan memperkenalkan PKS sehingga mempermudah dalam melaksanakan pendidikan politik maupun komunikasi dalam hal kepartaian, meski ditengah pandemi dan fakta bahwa konsep tersebut menjadi salah satu akar dari keberhasilan di tiap Pemilu yang dilakukan sejak tahun 2004, hal ini disampaikan saat wawancara:

“Mereka itu kan (PKS Kota Bogor) pendekatannya berbeda ya dibandingkan partai lain yang luas dulu baru dikerucutkan, sementara PKS dikuatkan dulu dari kadernya, setelah itu ada ilmu-ilmu militansi dari kaderisasi yang kental dan kuat, jadi konsep kaderisasi dari PKS adalah dengan membeli hati (kader) nya, dari kader itu membantu mengupayakan agar masyarakat disekitar

(kader) nya simpati dengan apa yang ada di PKS, bisa dikatakan PKS memiliki grassroot yang smooth-lah karena memang kita sebagai wartawan juga sering kecolongan ketika mereka sepertinya tidak ada pergerakan disuatu daerah tahu-tahu (perolehan) suaranya tinggi aja.” – (Wawancara: Rizky, Wartawan Bogor Daily, 19 Mei 2022).

Strategi yang dilakukan oleh kader PKS dalam memberikan pendidikan politik PKS juga tidak banyak menggunakan sumber daya, hanya perlu dilakukan dari rumah-ke-rumah dan dilakukan dengan skema sesederhana mungkin sehingga wartawan seperti Rizky cukup kesulitan dalam menggali informasi pada saat kegiatan pendidikan politik. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Haris yang mengatakan bahwa PKS datang hingga ke Majelis Ta’lim guna memberikan sedikit tausiah dan juga memberikan arahan mengenai peran apa yang dapat dilakukan PKS untuk lingkungan tempat tinggalnya.

“Waktu itu saya sempat A’ ikut kegiatan di Muqorrobin (Majelis Ta’lim) sama ada juga Pak Adit (Anggota Legislatif Fraksi PKS Kota Bogor) dateng, Pak Nain kasih kajian dan sembako juga, ya saya lupa sih (isu/topik utama) intinya karena sempet disini banjir, mereka bilang kalau PKS siap membantu jika memang ada masukan mengenai bencana dan katanya mau meringankan warga yang ya kasarnya jelek lah (rumah tidak layak huni). Abis itu saya dimasukin ke grup warga, katanya buat sampaikan aspirasi dan lain-lain tapi sekarang udah jarang dibales, banyak warga juga yang keluar dari grup.” (Wawancara: Haris, 20 Mei 2022).

Dilihat dari bentuknya, PKS sebagai partai Islam seakan menegaskan bahwa mereka bisa hadir melalui berbagai celah khususnya kegiatan yang bersifat keagamaan, hal tersebut sangat membantu PKS untuk melakukan kegiatan yang bersifat kependidikan politik. Selain itu DPD PKS sendiri juga mengupayakan penggunaan *gadget* dalam menginformasikan apa saja kegiatan yang dapat di akses atau di ikuti oleh warga, karena memang PKS memiliki database mengenai masyarakat yang memiliki kedekatan maupun kaitan sebelumnya dengan DPD PKS Kota Bogor, berberapa masyarakat tersebut sebelumnya pernah dibantu oleh PKS melalui kegiatan advokasi atau berberapa organisasi sayap kepemudaan PKS Kota Bogor seperti Gema

Keadilan, Garuda Keadilan dan PKS Muda, hal tersebut dapat membantu PKS dalam mengajak masyarakat untuk ikut berberapa kegiatan politik kemasyarakatan yang umumnya dilakukan secara online seperti PLC, Public Hearing dan lain-lain.

Berdasarkan data yang diambil pada saat wawancara dan berbagai studi yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan bahwa strategi pendidikan politik pada masyarakat yang dilakukan oleh PKS pada dasarnya merupakan sebuah konsep persuasif dan ajakan untuk ikut serta dalam kegiatan pendidikan politik. Kegiatan tersebut dibagi menjadi empat metode pendekatan, yaitu jemput bola, memberdayakan grassroot, mengisi tausiah dan program berkelanjutan.

1) Jemput Bola

Pada konsep ini kader maupun simpatisan PKS yang terdiri dari berberapa jenjang hadir untuk mengajak langsung masyarakat untuk blusukan dan menyapa masyarakat guna melakukan pendidikan politik secara tidak langsung maupun secara langsung. Hal ini membantu PKS dalam memperkenalkan PKS sehingga masyarakat bukan hanya mendapatkan pendidikan politik secara teoritis tetapi juga membantu partai untuk mendapatkan dukungan secara politis.

2) Memberdayakan Grassroot

PKS dikenal sebagai partai kader yang memiliki grassroot yang militan dan memiliki daya pengaruh yang terpandang di masyarakat sehingga dari hal tersebut, grassroot yang dapat dikatakan sebagai kader pendukung ini sangat membantu PKS dalam masuk kedalam lingkungan masyarakat dan melakukan berbagai pendekatan guna memberikan pengaruh maupun pendidikan politik.

3) Mengisi Tausiah

Sebagai partai yang berbasis pada agama dan kader, PKS memiliki koneksi untuk masuk ke dalam lingkungan keagamaan seperti musala, majelis *ta'lim* hingga masjid. Biasanya dilakukan ketika banyak massa yang berada di lingkungan tersebut, PKS hadir untuk memberikan

tausia sekaligus pendidikan politik berbasis keagamaan.

4) Membentuk Media Center PKS

Memiliki berbagai program pendidikan politik, maka sangat disayangkan jika program-program tersebut tidak dilaksanakan secara berkelanjutan, maka dari itu PKS biasanya mempertahankan jaringan masyarakat dengan menyimpan data masyarakat seperti nama dan nomor telepon dengan media grup whatsapp yang terkomando langsung DPD PKS Kota Bogor agar ketika PKS memiliki program pendidikan politik, PKS bisa memanggil masyarakat agar dapat mengikuti kegiatan pendidikan politik yang selanjutnya.

C. Pendidikan Kader PKS Kota Bogor

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya adapun pendidikan politik yang diberikan khusus kepada para anggota dari Partai Keadilan Sejahtera adalah adanya pengkaderan yang berjenjang dan bertingkat. Pengkaderan ini tentunya untuk mencetak kader-kader yang tangguh, militan, dan mempunyai kemampuan leadership yang mumpuni. Pengkaderan ini sebagai syarat dan berhubungan erat terkait dengan pendelegasian partai kepada kadernya untuk menjadi anggota legislatif ataupun merupakan bagian eksekutif. Pelaksanaan pendidikan politik ini salah satunya dilakukan juga oleh para pengurus di DPD PKS Kota Bogor, berdasarkan hasil observasi awal dengan Sekretaris Umum DPD Kota Bogor, Dedi Mulyono bahwa ada beberapa fokus yang dikaji, khususnya tentang pendidikan politik di masa pandemi saat ini. Selama masa pandemi, pendidikan politik yang dilaksanakan oleh DPD PKS Kota Bogor mengalami kendala dan hambatan yang belum pernah terjadi. Dari keterangan yang diberikan oleh Erry Nugroho sebelumnya bahwa terkait pendidikan yang ditujukan kepada kader dan pengurus partai dilaksanakan dengan zoom atau ditunda hingga waktu yang memungkinkan namun yang menjadi kendala utama adalah pendidikan politik yang ditujukan bagi masyarakat sekitar karena aturan pemerintah yang melarang adanya kerumunan dan perkumpulan, khusus untuk Kota Bogor larangan tersebut tertera dalam SuratEdaran Walikota Bogor Nomor : 443/1/1075 sementara Undang-Undang Partai Politik tetap mengharuskan

pelaksanaan pendidikan politik ini sebagai tugas dari Partai Politik. Bahwa untuk menciptakan pemimpin yang baik, maka harus dilaksanakan pendidikan pelatihan termasuk di bidang politik guna membekali para kader yang akan menjadi pemimpin dengan ilmu pengetahuan yang luas.

Bentuk pendidikan politik kader merupakan kegiatan program kerja dari divisi kaderisasi, kegiatan ini bertujuan untuk merekrut ataupun menambah anggota kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan cara melaksanakan agenda tentang Rekrutmen Politik dengan cara mendaftar secara mandiri melalui website PKS ataupun bisa mendaftar melalui pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC), PKS juga memiliki sistem rekrutmen khusus. Selain itu dari DPD PKS Kota Bogor juga melaksanakan UPA (Unit Pembinaan Anggota) seperti yang telah dijelaskan sebelumnya kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang mana memberikan lagi tugas tersebut dan menginstruksikan kepada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) membagi tugas lagi yaitu kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dari Pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) memberikan tugas lagi kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan yang terakhir sampai ke tingkat Ranting, di tingkat Ranting ini ialah kader yang berada di wilayah kelurahan.



Gambar 8. Dokumentasi UPA PKS Kota Bogor Januari 2022 (Sumber: DPD PKS Kota Bogor).

Dari sekian proses pelaksanaannya, UPA (Unit Pembinaan Anggota) secara tujuan dilaksanakan guna untuk menunjang dan memfasilitasi kader yang baru bergabung bersama PKS agar dapat menambah wawasan dan

keilmuan terutama tentang Partai Politik mengingat kader PKS wajib dibekali pemahaman yang intensif, rutin dan *continue* atau berkelanjutan tetapi khusus selama masa pandemi ini PKS berinovasi dengan berbagai macam konsep pendidikan selama masa pandemi, salah satunya metode *hybrid* yang dikonfirmasi oleh Fazlur, kader nonaktif PKS Kota Bogor.

“UPA itu menjadi salah satu desain PKS sampai saat ini, program ini sifatnya berkelanjutan dan wajib diikuti oleh seluruh kader tanpa kecuali, memang kegiatannya padat sekali, apalagi kalo kerja udah pasti keteteran. Tapi kalo emang kita niat sebagai kader dan bulatkan tekad untuk masuk pembinaan sebenarnya bukan masalah. Waktu itu terakhir pembinaan pas pandemi, jadi karna di kantor gak boleh digunakan jadi pakai media online, terus kegiatan lain karena berberapa harus tatap muka jadi setengah dirumah setengah lagi dateng ke kantor DPD..”
(Wawancara: Fazlur, Kader Nonaktif PKS Kota Bogor, 28 Mei 2022).

Menurut Fazlur, pembinaan PKS sangat penting sehingga walaupun dimasa pandemi konsep yang digunakan sebisa mungkin dapat menunjang untuk kegiatan di masa pandemi bahkan dengan metode *hybrid* yaitu pembatasan pertemuan yang menggunakan setengah media online dan setengah media offline. Fazlur menjelaskan bahwa konsep tersebut banyak membantu kader dalam menerima pendidikan politik selama masa pandemi dan banyaknya pembatasan kegiatan yang sebelumnya berpotensi mengurangi mobilitas seluruh elemen masyarakat termasuk partai politik didalamnya. Hal ini menjadi temuan yang menarik dan seakan menegaskan bahwa pendidikan politik harus terus berjalan dengan kondisi pandemi sekalipun.

D. Pendidikan Politik Masyarakat di PKS Kota Bogor Selama Masa Pandemi

Ada beberapa bentuk atau strategi pendidikan politik yang dilakukan DPD PKS Kota Bogor, utamanya adalah bentuk pelayanan pada masyarakat, hal tersebut sesuai dengan arahan Ketua Majelis Syuro PKS, Dr. Salim Assegaf bahwa PKS termasuk dalam lingkup DPP hingga DPC harus masuk ditengah masyarakat sebagai pelayan, saat pemilu maupun saat tidak pemilu, PKS menyebutnya adalah pelayanan tak kenal batas waktu. Bentuk-bentuk

pendidikan politik tersebut adalah:

1. Bakti Sosial

Bakti Sosial ini dimaksudkan untuk memberikan secara langsung kebutuhan mendesak dari rakyat. Kebutuhan yang mendesak ini adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi dalam jangka pendek. Dengan demikian, PKS tidak hanya menyiapkan strategi jangka panjang dalam pemenuhan kebutuhan rakyat, tetapi juga memberikan solusi jangka pendek bagi kebutuhan masyarakat. Dalam bentuk kegiatan ini, diharapkan juga para kader PKS dapat merasakan keadaan yang dialami oleh rakyat secara langsung. Dengan demikian akan meningkatkan semangat bagi kader PKS yang duduk di lembaga negara untuk semakin giat dalam memperjuangkan nasib rakyat dan mengabdikan kepada rakyat.

Salah satu bentuk bakti sosial yang dimiliki DPD PKS adalah dengan menyediakan ambulance dalam rangka pelayanan sekaligus pendidikan politik bagi masyarakat, keberadaan ambulance tersebut menjadi sebuah perhatian masyarakat khususnya pada masa pandemi Covid-19 yang mengganas.



Gambar 9. Salah satu ambulance milik kader PKS (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2022).

Ambulance tersebut juga menjadi sarana pendidikan PKS dengan sekelilingnya menggunakan *cutting sticker* dengan brand partai dan kader yang biasanya akan berkontestasi di Pemilu. DPD PKS Kota Bogor memiliki 3 ambulance, dimana jumlah tersebut belum termasuk ambulance hibah dari kadernya. Peran dari salah satu bentuk bakti sosial ini cukup berarti di masyarakat, hal tersebut di konfirmasi saat wawancara:

“Waktu kalo gasalah tahun 2020, saya lupa bulannya tapi awal-awal tahun lah saya sakit TBC, waktu itu duh udah parah, dibawa ke Puskesmas (Mekarwango) eh ternyata disuruh rujuk ke Melia (RS di Kota Bogor) karna alatnya gaada katanya, pas mau pake ambulance waktu itu lagi gaada katanya, akhirnya pas nanya warga dan tetangga yang kebetulan ikut bawa akhirnya dicoba lah hubungi Pak Tavip (Pemegang kunci ambulance PKS), langsung itu dateng ambulance dari Kp. Rau. Ambulance nya gratis, tapi ya kasih uang rokok ke sopir. Nah gara-gara ambulance itu jadi tau, oh gini kerjaan partai saya kira urus urusan pemerintah doang, yang kalo udah kepilih mah lupa sama kita-kita.”
(Wawancara: Rustam, Peserta Pendidikan Politik PKS Kota Bogor, 22 Mei 2022).

Menurut Rustam, salah satu warga yang pernah merasakan pelayanan Ambulance ini mengakui bahwa dirinya sangat terbantu dengan adanya pelayanan ini. Dari segi pendidikan politiknya, ambulance ini membantu partai dalam memberikan pendidikan politik karena dengan ambulance ini warga bisa merasakan bukti bahwa partai memiliki peran sosial dalam masyarakat.

2. Kegiatan Advokasi Warga

Advokasi ini diartikan sebagai pendampingan partai kepada masyarakat dalam memperjuangkan apa yang menjadi keinginannya serta dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat, khususnya dalam bidang politik. Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan penuh atas negara Republik Indonesia ini sudah sepatutnya mendapatkan hak-haknya. Karena keterbatasan sumber daya maupun akses serta jaringan yang dimiliki masyarakat, maka partai membantu atau mengadvokasi yang memang seharusnya menjadi hak dari masyarakat. Dalam advokasi ini tentunya melibatkan dari berbagai elemen yang ada di dalam

kepengurusan PKS. Sehingga masyarakat benar-benar merasakan kehadiran partai di tengah-tengah kehidupan mereka.

PKS Kota Bogor dalam pendidikan politiknya melakukan kegiatan pelayanan advokasi atau pembelaan secara hukum kepada hak-hak maupun aspirasi warga. Sebagai contoh saat Atang Trisnanto selaku Ketua DPD PKS Kota Bogor beserta fraksi PKS di DPRD Kota Bogor pada 20 September 2019 silam melakukan peninjauan terhadap permasalahan dana kerohiman warga yang terdampak proyek pembangunan jalur ganda (*double track*) kereta api Bogor-Sukabumi.



Gambar 10. Peninjauan proyek rel kereta Bogor-Sukabumi (Sumber: Antara, 2019).

Pada kasus ini ribuan rumah warga di Kota Bogor tergusur karena terdampak proyek pembangunan tersebut, PKS hadir untuk memastikan bahwa seluruh hak warga yang terdampak dapat dipenuhi oleh PT. KAI selaku pemegang proyek. Lalu ada kegiatan advokasi yang sebenarnya hal kecil seperti penebusan ijazah, tidak dapat dipungkiri bahwa bagi beberapa orang ijazah sangat penting, utamanya untuk mendaftar pekerjaan. PKS menilai, menjadi hal yang ironi jika adanya lapangan kerja, tetapi pemerintah tidak membantu setidaknya memberi 'modal' agar dapat bekerja, karena modal kerja bukan hanya uang saku tetapi juga ijazah. Fraksi PKS memperjuangkan agar program penebusan ijazah bagi warga yang membutuhkan agar dapat dianggarkan oleh Pemkot Bogor.

Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil juga berhasil mengadvokasi bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di

Kelurahan Paledang Kecamatan Bogor Tengah. Tiga rumah tersebut sudah mulai direnovasi melalui bantuan yang diterima.

“Ini rumah saya ditinggali saya sendiri, anak 2 sekarang sudah SMA dan masih bayi satu. Bapaknya buruh kebun, jadi kita waktu itu rumah didatangi oleh Pak Faisal (Lurah) bahwa akan ada anggota DPRD yang datang untuk membantu renovasi. Ternyata itu dari Pak Adil. Tapi memang dikasih dari pemerintah Cuma 5 jutaan, jadi bapak nambahin sekian buat renovasi sisanya. Alhamdulillah terbantu tetapi memang masih kurang kalau untuk renovasi rumah walaupun sekecil ini.” (Wawancara: Ibu Marni, Warga Ikut RTLH Kota Bogor, 22 Mei 2022).



Gambar 11. Kegiatan Advokasi RTLH (Sumber: Suara, 2022).

Menurut Marni, PKS dalam hal ini Fraksi DPRD Kota Bogor sangat membantu dan memberikan hasil nyata dalam konteks memberikan bantuan kemasyarakatan, sehingga memang saat ini dirinya mengakui bahwa jadi mengenal lebih jauh PKS dan tokoh-tokoh yang telah singgah dan memberikan pemahaman mengenai bantuan dan peran partai politik dalam pusaran legislatif.

Karena memang besaran bantuan yang diterima kisaran enam hingga belasan juta rupiah, bahkan ada yang menerima hingga 17,5 juta rupiah. Dana tersebut naik dari yang sebelumnya hanya lima juta rupiah karena dirasa tidak mencukupi. Komitmen PKS ini sudah digaungkan dan dipertegas dalam Rapat Badan Anggaran bersama TAPD Kota Bogor bulan November 2021 silam.

3. Model Dialog Interaktif

Dalam konsep ini partai melatih masyarakat dan anggotanya

untuk saling berkomunikasi serta untuk memberikan penekanan adanya transparan dan rasa saling terbuka. Dalam model ini pula partai akan memberikan gambaran yang sebenarnya tentang partai dan anggotanya yang duduk di parlemen. Gambaran dan penjelasan ini sebenarnya dibutuhkan agar masyarakat tidak hanya berprasangka buruk dan salah dalam memahami kinerja partai dan anggota dewan. Titik tekan dalam model ini adalah partisipasi dari rakyat dalam penyelenggaraan negara dengan memberikan saran dan masukkan kepada para penyelenggara negara serta untuk menumbuhkan rasa saling pengertian dan keterbukaan antara penyelenggara negara atau partai dengan basis masanya, yakni rakyat itu sendiri. Bagi PKS Kota Bogor, dialog merupakan unsur yang sangat penting jika masyarakat dapat merasakan keberadaan partai sebagai pendengar dan pemberi solusi setiap permasalahan yang ada di Kota Bogor, maka dari itu PKS Kota Bogor memiliki banyak program pendidikan politik melalui dialog interaktif.

a. Penyuluhan Hak Kesehatan

Sebagai contoh bagi PKS, masalah kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat termasuk pemerintah, meski demikian program kesehatan seperti BPJS itu cukup rumit karena faktanya mereka membutuhkan layanan kesehatan yang mudah, namun keengganan masyarakat untuk mendaftar menjadi anggota BPJS menjadi masalah khususnya ketika masyarakat tersebut memerlukan layanan kesehatan tersebut.

Selain itu beberapa masalah di lapangan ditemui PKS seperti warga yang terdaftar BPJS tetapi menunggak iuran, karena ketika masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan mereka harus melunasi tunggakan iuran BPJS tersebut. Meski diakui bahwa banyak warga yang meminta kepada kader maupun anggota dewan PKS agar dapat dilunasi atau ditebus agar BPJS dapat digunakan, dalam kasus ini PKS turut serta dalam melakukan mengedukasi masyarakat agar memahami sistem yang terdapat di BPJS. Misalnya, bagi warga yang memang belum mendaftar BPJS maka mereka diajak agar segera daftar agar dapat menikmati kepastian layanan kesehatan dari program tersebut, lalu juga memastikan bahwa warga yang bersangkutan agar teratur dalam pembayaran iuran BPJS.

Nyatanya, masalah BPJS tidak berhenti soal iurannya, tetapi juga masalah ketersediaan kamar, obat-obatan dan berbagai hak sebagai pasien anggota BPJS. Jika memang ada warga yang benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk membayar iuran BPJS, maka PKS dalam hal ini fraksi bisa mengawal hak warga yang tidak mampu agar dapat segera menggunakan BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran). Pada masa pandemi, DPD PKS Kota Bogor juga memaksimalkan hak partai politiknya sebagai sarana pendidikan politik untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya vaksin Covid-19. DPD PKS Kota Bogor sangat mendukung program pemerintah guna penanganan kesehatan di masa pandemi, karena bagi PKS, kunci lolos dari pandemi itu adalah sehat dan salah satu cara sehat itu adalah dengan vaksin. Maka dari itu PKS berkontribusi dengan senantiasa memberikan ruang khusus kepada seluruh kader, anggota maupun masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi.

Pada awal dibukanya program vaksinasi oleh pemerintah, beberapa kali terjadi kerumunan hebat akibat dari atensi dan keinginan masyarakat yang membludak untuk melakukan vaksin, untuk itu selama masa pandemi, PKS telah membuka layanan vaksinasi bekerja sama dengan Puskesmas Pondok Rumput di Kota Bogor. DPP PKS melalui surat edarannya juga telah mewajibkan seluruh anggota dan kader agar melaksanakan minimal vaksin kedua sebagai wujud perlindungan dan keinginan agar setidaknya terciptanya lingkungan sehat di DPD PKS Kota Bogor.



Gambar 12. Banner Program Vaksin (Sumber: Instagram PKS Kota Bogor, 2022).

Lalu tidak berhenti pada kader saja, pada 14 April 2022,

Satgas Covid-19 PKS Kota Bogor bekerjasama dengan puskesmas pondok rumput membuka pendaftaran vaksin booster yang bertempat di Kantor PKS Kota Bogor Jl. Kebon Pedes No.33, RW.04, Kel. Kebon Pedes, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor.

b. Hari Aspirasi Fraksi PKS Kota Bogor

Masih dalam model dialog interaktif, PKS juga memiliki program hari aspirasi di ruang fraksi DPRD Kota Bogor, dalam kegiatan ini seluruh anggota dewan PKS di DPRD Kota Bogor tidak boleh ada yang pergi agar dapat mendengar aspirasi warga yang datang ke fraksi PKS, namun warga juga dapat datang ke fraksi DPRD kapanpun selama hari kerja, meski demikian anggota yang hadir untuk menemui mungkin kurang lengkap.

“Dalam hari aspirasi, kita memang menerima aspirasi secara bebas dalam artian dari elemen masyarakat baik itu perwakilan warga dilingkungan ataupun misalnya organisasi atau komunitas yang ada. Nah kita dari aspirasi sangat terbuka untuk mendengar apapun muatan aspirasi yang ada di Kota Bogor, jikalau memang masih dalam lingkup yang dapat kami tangani maka akan kami bantu dorong atau jika memang tidak maka kami akan mencarikan solusi bersama-sama, karena memang ada beberapa aspirasi yang karena memang bukan ranah DPRD jadi kita tidak bisa berbuat lebih banyak selain mediasi.” (Wawancara: Budi Bahtiar, Humas Fraksi PKS Kota Bogor, 17 Mei 2022).

Setiap aspirasi yang diberikan oleh masyarakat akan ditampung lalu dibawa oleh PKS ke level yang lebih kompeten seperti ke komisi, namun jika aspirasi tersebut dapat diselesaikan oleh fraksi maka masalah tersebut tidak akan dibawa ke ruang dewan. Program ini sudah berjalan sejak tahun 2004 bahkan ketika masa pandemi selama DPRD Kota Bogor tidak ditutup, ruang fraksi tetap dibuka untuk masyarakat yang ingin datang dengan catatan mengenakan protokol kesehatan yang ketat sesuai aturan dari Gedung DPRD Kota Bogor.



Gambar 13. Banner Hari Aspirasi PKS (Sumber: Facebook PKS Kota Bogor, 2019).

c. PKS Legislative Corner Kota Bogor

Bagi PKS, media sosial merupakan sebuah fitur yang bisa dimanfaatkan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada publik karena jangkauan luas yang diberikan media sosial saat ini bisa membantu masyarakat untuk melihat sejauh mana kiprah PKS di lingkup nasional maupun regional seperti di DPD PKS Kota Bogor.

“PLC ini adalah program talkshow bersama anggota PKS yang berfokus pada satu isu. Antara kita yang merespon atas isu yang ada atau kita yang menaikkan sebuah itu, karena memang ada beberapa isu yang coba kita naikan lewat program ini, seperti yang kemarin anggaran untuk kesejahteraan, isu ini tidak terlalu hangat di media tetapi kita coba naikkan sebagai konten di PLC, selain itu juga sebagai informasi mengenai produk Perda, karena cukup banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa kegiatan dewan dan apa muatan dalam Perda, karena secara umum masyarakat hanya mengetahui bahwa fungsi dewan sebagai penampung aspirasi tetapi belum tentu memahami fungsi legislasi dari dewan itu

sendiri.” (Wawancara: Budi Bahtiar, Humas Fraksi PKS Kota Bogor, 17 Mei 2022).



Gambar 14. Banner PLC Eps. 21 (Sumber: Instagram PKS Kota Bogor, 2022).

Konsep dari PLC ini cukup menarik karena mengikuti tren jaman mengenai sarana komunikasi, PLC memilih konsep talkshow podcast dengan muatan-muatan seputar kelembagaan di fraksi hingga isu-isu terkini guna menjawab dan memberikan pemahaman politik mengenai apa isu yang terjadi di sekitar masyarakat.

Tabel 7. Media sosial yang dimiliki oleh PKS Kota Bogor

No.	Tgl	Judul	Host	Pembicara
1.	7/4/21	Kupas Tuntas LKPJ Walikota Bogor 2020 : Bidang Hukum Dan Pemerintahan	Gunawan, S.E (Tenaga Ahli FPKS DPRD Kota Bogor)	H. M. Dody Hikmawan, SE (Anggota Komisi I DPRD Kota Bogor)
2.	14/4/21	Kupas Tuntas LKPJ Walikota Bogor 2020 Sesi 2 : Bidang Perekonomian	Gunawan, S.E (Tenaga Ahli FPKS DPRD Kota Bogor)	Angga Alan Surawijaya, S.Pi, M.Si (Wakil Ketua Komisi II)

		Dan Keuangan		DPRD Kota Bogor)
3.	15/4/21	Kupas Tuntas LKPJ Walikota Bogor 2020 : Bidang Kesejahteraan Rakyat	Muhammad Herfan Nufandra, S.Pt (Staf Khusus Fraksi PKS DPRD Kota Bogor)	Endah Purwanti, S.Pi (Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor)
4.	28/4/21	Kupas Tuntas LKPJ Walikota Bogor 2020 : Bidang Pembangunan Dan Lingkungan	Gunawan, SE (Tenaga Ahli Fraksi PKS DPRD Kota Bogor)	H. Karnain Asyhar, S.P, M.Si (Anggota Komisi III DPRD Kota Bogor)
5.	5/5/21	Menilik Masa Depan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro Di Kota Bogor	Gunawan, SE (Tenaga Ahli Fraksi PKS DPRD Kota Bogor)	Mardiyanto, S.Pi (Wakil Ketua Pansus Raperda Pemberdayaan, Pengembangan, dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro)
6.	2/6/21	Jalan Panjang Mengawal Legislasi Daerah	Gunawan, SE (Tenaga Ahli Fraksi PKS	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I

			DPRD Kota Bogor)	(Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bogor)
7.	16/6/21	Raperda Santunan Kematian Untuk Siapa ?	Febri Nur Aini, S.Pt (Staf Khusus Fraksi PKS DPRD Kota Bogor)	Anna Mariam Fadhilah, S.Si, M.Si (Ketua Raperda tentang Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin DPRD Kota Bogor)
8.	30/6/21	Perda Pelayanan Air Minum, Alat Basuh Pelayanan Yang Keruh	Gunawan, SE (Tenaga Ahli Fraksi PKS DPRD Kota Bogor)	Ir. H. Muaz HD (Anggota Pansus Raperda Pelayanan Air Minum DPRD Kota Bogor)
9.	7/7/21	Covid-19 Kota	Gunawan, SE	Endah

		Bogor Kritis, Sudahkah Pemkot Lakukan Langkah Taktis ?	(Tenaga Ahli Fraksi PKS DPRD Kota Bogor)	Purwanti, S.Pi (Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor)
10.	28/7/21	PPKM Next Level, Mampukah Covid-19 Turun Level ?	Gunawan, SE (Tenaga Ahli Fraksi PKS DPRD Kota Bogor)	H. Atang Trisnanto, S.Hut, M.Si (Ketua DPRD Kota Bogor)
11.	4/8/21	PP APBD 2020, Optimis Atau Pesimis ?	Gunawan, SE (Tenaga Ahli Fraksi PKS DPRD Kota Bogor)	Adityawarm an Adil, S.Si, M.Si (Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bogor)
12.	18/7/21	Aksi Peduli Untuk Negeri, 1000 Subsidi Aplikasi Dalam Rangka Dirgahayu Republik Indonesia Dan Hari Umkm Nasional	Siti Ulfah Hasanah, S.Si (Tenaga Ahli Fraksi PKS DPRD Kota Bogor)	Mardiyanto, S.Pi (Anggota Komisi I DPRD Kota Bogor)
13.	1/9/21	Revisi RPJMD Terpasung, Perda	Gunawan, SE (Tenaga Ahli	Hj. Sri Kusnaeni,

		RTRW Tak Kunjung Rampung	Fraksi PKS DPRD Kota Bogor)	S.T.P, M.E.I (Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bogor)
14.	21/9/21	Potret Pendidikan Di Era New Normal : Polemik Atau Membaik ?	Siti Ulfah Hasanah, S.Si (Staf Khusus Fraksi PKS DPRD Kota Bogor)	Anna Mariam Fadhilah, S.Si, M.Si (Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor)
15.	13/10/2 1	Kekerasan Pelajar, Potret Pendidikan Kelam ?	Gunawan, SE (Tenaga Ahli Fraksi PKS DPRD Kota Bogor)	H. Atang Trisnanto, S.Hut, M.Si (Ketua DPRD Kota Bogor)
16.	27/10/2 1	Kupas Tuntas Raperda Penyelenggaraan Dan Penanganan Kesejahteraan Sosial	Gunawan, SE (Tenaga Ahli Fraksi PKS DPRD Kota Bogor)	H. M. Dody Hikmawan, SE (Ketua Pansus Penyelenggaan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial

				(P2KS) DPRD Kota Bogor)
17.	3/11/21	Dampak UU Cipta Kerja Terhadap Legislasi Daerah	Siti Ulfah Hasanah, S.Si (Staf Khusus Fraksi PKS DPRD Kota Bogor)	Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P, M.E.I (Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bogor)
18.	10/11/2 1	Dinamika Perizinan Usaha Di Kota Bogor	M. Herfan Nofandra, S.Pt (Staf Khusus Fraksi PKS DPRD Kota Bogor)	Mardiyanto, S.Pi (Anggota Komisi I DPRD Kota Bogor)
19.	29/12/2 1	Kota Bogor Dikepung Bencana, Apakah Pemerintah Kota?	Gunawan, SE (Tenaga Ahli Fraksi PKS DPRD Kota Bogor)	Endah Purwanti, S.Pi (Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor)
20.	23/03/2 2	Transformasi Pesantren Kota Bogor	Rizaldy (Staf Khusus Fraksi PKS DPRD Kota Bogor)	M. Dody Hikmawan, SE (Wakil Ketua Pansus Perda

				Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren DPRD Kota Bogor)
21.	13/03/22	Kupas Tuntas LKPJ Walikota Bogor Tahun 2021 : Pembangunan Dan Lingkungan	Dhivya Febriyanti M, S.Pd (Staf Khusus Fraksi PKS DPRD Kota Bogor)	Adityawarm an Adil, S.Si, M.Si (Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bogor)

Sumber: Youtube DPD PKS Kota Bogor, 2022.

Secara garis besar, tema yang digunakan dalam program PLC ini berbicara tentang berbagai dinamika yang terjadi di DPRD seperti berbicara anggaran, laporan pertanggung jawaban, kebijakan dan lain-lain. Hal tersebut terlihat dalam PLC pada 4 episode pertama yang membicarakan isu LKPJ mengenai berbagai bidang, hal ini berarti fraksi PKS juga ikut mengawasi kiprah anggota dewannya yang terlibat langsung dalam LKPJ selain itu fungsi pengawasan yang dilakukan Fraksi PKS Kota Bogor juga ikut membantu mewujudkan peran Partai Politik untuk senantiasa mendidik masyarakat mengenai isu-isu yang terjadi dalam politik dalam lingkup lokal. Selain itu isu kebijakan yang dilakukan Walikota Bogor seperti kebijakan PPKM, New Normal, Pendidikan, Kebijakan Sosial, Pembangunan dan lain-lain juga ikut disuarakan oleh Fraksi PKS melalui program PLC ini. Banyaknya anggota legislatif yang terlibat dan menjadi pembicara seolah menegaskan bahwa PLC ini juga menjadi penyambung lidah bagi anggota dewan untuk menjelaskan mengenai isu tersebut kepada masyarakat.

d. Public Hearing PKS

Program Public Hearing ini adalah sebuah program yang digunakan oleh PKS dengan tujuan menjadi wadah menampung aspirasi serta sebagai sarana sosialisasi yang menghadirkan langsung narasumber yang berkompeten di bidangnya.



Gambar 15. Banner Public Hearing (Sumber: Instagram PKS Kota Bogor, 2022).

Konsep dari program ini berbeda dengan PLC dan Hari Aspirasi, karena program ini menggunakan media zoom dimana masyarakat bukan hanya mendengar tetapi juga dapat berpartisipasi aktif karena meski pertemuan tanpa tatap muka, masyarakat bebas untuk ikut serta dan bertanya langsung lewat media zoom tersebut.

“Public hearing sejauh ini sudah berjalan 5 episode, public hearing kita menjajakan tema khusus dari Partai dengan mengundang pihak terkait untuk meminta masukan dari warga atau memang tema tersebut sedang dirasakan oleh masyarakat. Misalnya program relaksasi bagi pengguna JKN BPJS Kesehatan yang informasi nya masih simpang siur di masyarakat. Padahal

program Relaksasi ini akan segera berakhir sekitar seminggu setelah program Public Hearing dengan tema ini diselenggarakan. Oleh karena itu, Fraksi PKS DPRD Kota Bogor bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Kota Bogor mengadakan Public Hearing dengan tema "Kupas Tuntas Relaksasi dan Tunggakan BPJS" dengan narasumber Fahrurrozi selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Bogor." (Wawancara: Budi Bahtiar, Humas Fraksi PKS Kota Bogor, 17 Mei 2022).

Garis besarnya, program ini layak sosialisasi di balai warga, lengkap dengan narasumber yang memiliki kompetensi sesuai dengan isu yang diangkat serta tentu saja warga yang menjadi bagian dari terangkatnya isu tersebut, berbeda dengan PLC yang merupakan program yang konsep talkshow dimana biasanya para audiens diberi keterbatasan dalam menyampaikan pendapat.



Gambar 16. Zoom Public Hearing (Sumber: Instagram PKS Kota Bogor, 2022).

Misalnya pada Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan oleh DPRD Kota Bogor dan Pemerintah Kota Bogor yang sudah mendekati akhir pembahasan. Raperda ini menjadi sesuatu hal yang penting bagi Kota Bogor, dimana nantinya Raperda ini akan mengatur berbagai hal seputar Ketentraman dan Ketertiban Umum di masyarakat. Dalam tema ini PKS mengundang Agustiansyah, S.T.P sebagai Kepala Satpol PP Kota Bogor serta Alma Wiranta, S.H.,M.Si

selaku Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bogor, dua narasumber tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat Kota Bogor, didalamnya juga terdapat banyak warga yang terlibat dalam memberikan masukan maupun aspirasinya.

4. Publikasi Buletin

Kadang masyarakat bertanya-tanya tentang apa yang telah dilakukan partai atau fraksi DPRD selama dalam periodenya, apa saja pencapaian dan kebijakan yang telah dibuat oleh para anggota legislatif, buletin Parlemenaria merupakan bentuk publikasi yang dilakukan oleh DPD PKS serta Fraksi PKS Kota Bogor guna mengangkat isu terkini seputar kiprah Fraksi PKS Kota Bogor dengan konsep buletin.



Gambar 17. Header Parlemenaria (Sumber: Google Drive PKS Kota Bogor, 2022).

Sejak diperkenalkan 20 Juni 2020, buletin ini telah terbit selama 42 edisi dengan berbagai tema yang diusung. Hal ini menarik karena meski disaat pandemi, konten atau topik yang diusung oleh Parlemenaria tidak terbatas pada masa pandemi, menurut Tenaga Ahli Fraksi PKS DPRD Kota Bogor, bapak Gunawan, SE buletin ini merupakan penjelasan terhadap berbagai isu yang dihadapi oleh masyarakat dan keterlibatan fraksi PKS didalamnya.

5. Meme

Meme merupakan fenomena yang sedang booming di kalangan pengguna media sosial di Indonesia saat ini, misalnya di twitter, facebook, path dan instagram (Nugraha dkk, 2015:238). Iqbal Hafi zhul L menegaskan bahwa fenomena meme sering kali menggambarkan suatu kejadian yang sedang heboh baik di dunia nyata maupun dunia maya (Hafi zhul L: 2017). Meme adalah sebuah ide, gagasan, kata-kata yang sudah menjadi bagian dari budaya yang mampu menyebar secara luas dari generasi ke generasi (Pusanti dan Haryanto, 2014: 8).



Gambar 18. Konten Meme PKS Kota Bogor (Sumber: Instagram PKS Kota Bogor, 2022).

Dalam hal ini PKS Kota Bogor tidak tertinggal, mereka dalam penyampaian komunikasi maupun pendidikan politik juga menggunakan media meme sebagai media penyampaian informasi yang bersifat ringan dan mudah diterima di tiap khalayak, khususnya anak muda meski memang volume postingannya tidak lebih banyak dengan konten-konten yang bersifat kepartaian dan muatan politik lainnya.

BAB V

MEDIA DAN ISU PENDIDIKAN POLITIK DI MASA PANDEMI

A. Penerapan Metode Hybrid pada Kegiatan Pendidikan Politik PKS Kota Bogor

PKS memiliki beberapa program pendidikan politik yang rutin dilaksanakan oleh para kader maupun aleg di dalam fraksi. Sebelum pandemi, konsep yang digunakan adalah konsep pertemuan tatap muka yang biasanya diadakan di balai warga atau *ballroom* yang dimiliki oleh DPD PKS Kota Bogor, PKS selama masa sebelum pandemi juga aktif dalam berbagai acara di masjid-masjid dan berbagai kajian keagamaan yang mana hal tersebut lumrah bagi PKS yang merupakan partai Islam dalam memberikan pendidikan politik, namun semenjak pandemi aktivitas tersebut cukup lama vakum bahkan sama sekali tidak diadakan selama hampir 2 tahun lamanya, semua digantikan dengan konsep pertemuan secara daring, namun menurut para narasumber, kajian pendidikan yang dilakukan secara online bukanlah sesuatu yang efektif dilakukan, maka PKS memodifikasi berbagai kegiatan dengan konsep baru meski tetap mempertahankan kegiatan tatap muka di tengah masa pandemi, yaitu pelaksanaan pendidikan politik tatap muka secara terbatas atau offline.

Hal ini di satu sisi merupakan solusi namun di sisi lain memiliki ancaman berupa potensi masalah yang dapat timbul. Sasaran yang ingin dicapai adalah bagaimana agar penyampaian informasi kader maupun komunikasi dengan masyarakat tetap terjaga. Untuk mencapai target maka perlu ditunjang oleh beberapa faktor seperti kesiapan sarana dan prasarana, bagaimana menyampaikan materi pembelajaran dengan baik kepada kader dan masyarakat, bagaimana supaya kader dan masyarakat yang disebut audiens bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru apabila sebelumnya pertemuan secara online di rumah kini harus kembali melakukan aktivitas pendidikan politik dengan metode baru dan harus mengikuti protokol kesehatan.

DPD PKS dalam penerapan pendidikan selama masa pandemi banyak

melakukan perubahan dalam memaksimalkan konsep pertemuan agar pendidikan politik tetap berjalan meski dalam kondisi pandemi. Menurut Dedi Mulyono, Ketua UPA PKS Kota Bogor program pendidikan PKS memiliki beberapa kategori, yaitu Pendidikan Politik Kemasyarakatan dan Pendidikan Politik Kader. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, pendidikan politik khusus kader memiliki banyak tingkatan yang dinamakan UPA (Unit Pembinaan Anggota), khususnya saat pembinaan Anggota Pelopor pada dasarnya diutamakan bersifat pertemuan, meski demikian kondisi pandemi yang naik turun kadang membuat kegiatan pembinaan tersebut menjadi sangat terbatas, maka ketika tidak memungkinkan secara offline atau tatap muka konsep tersebut berjalan dengan skema online, yaitu zoom, google meet bahkan dalam beberapa kesempatan menggunakan *video conference* dengan Whatsapp atau Telegram, meski umumnya menggunakan Zoom.

Pun sama halnya untuk Anggota Penggerak yang diutamakan bertatap muka, namun jika situasi tidak memungkinkan maka UPA menggunakan skema online dengan media zoom. Sementara untuk Anggota Pendukung, sebagian besar anggota dari kelompok pendukung tersebut merupakan masyarakat level menengah-kebawah dan dapat dikatakan jika menggunakan media daring seperti Zoom mereka cukup kesulitan khususnya dalam masalah ketersediaan jaringan internet secara intensif, hal ini dijelaskan dalam wawancara:

“Kalo di PKS pendidikan politik kita bagi menjadi beberapa, jadi kita memiliki kebijakan pengkaderan, kalau di PKS itu ada Anggota Pendukung, Penggerak dan Pelopor. Masing-masing itu ada bentuknya, nah yang paling intensif itu anggota pelopor yang melakukan pendidikan politik intensif sepekan sekali, nah memang biasanya sebelum pandemi ini pendidikan politik kita offline, tatap muka dan pertemuan, namun ketika masuk ke dalam masa pandemi itu tidak memungkinkan, makanya ketika tidak memungkinkan secara offline, maka bahkan sampai hari ini pendidikan politik untuk anggota pelopor yang kita sebut UPA, nah untuk UPA pelopor ini online dengan Zoom, Gmeet, Whatsapp maupun Telegram, sementara untuk anggota penggerak UPA juga online, nah memang untuk kegiatan anggota pendukung sebagian besar dari mereka adalah masyarakat menengah kebawah, dan itu kegiatan pendidikan tersebut kalo menggunakan media online tidak bisa diikuti secara intensif.” (Wawancara: Dedi Mulyono, Ketua UPA PKS Kota Bogor, 18 Mei 2022).

Meski demikian PKS sempat mencoba skema online tersebut namun dengan tingkat kehadiran yang rendah membuat pertemuan tersebut menjadi kurang efektif, hal tersebut terjadi karena memang tingkat keterikatan Anggota Pendukung dengan partai belum cukup kuat sehingga sulit bagi DPD PKS Kota Bogor untuk mengajak anggota pendukung untuk mengikuti skema yang telah ditawarkan partai meski secara personal mereka bersedia untuk mendukung setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh PKS, maka lanjut Pak Dedi khusus untuk anggota pendukung PKS menawarkan skema *hybrid learning* dengan menerapkan beberapa titik kumpul misalnya saat acara pendidikan politik untuk Pengurus Koordinator tingkat RT, biasanya dilakukan di satu rumah dengan pertemuan yang terbatas, misal hanya dilakukan maksimal 10 orang dirumah salah satu anggota lalu „nonton bareng“ narasumber yang telah disiapkan oleh DPD PKS Kota Bogor untuk mendengar arahan dari pimpinan. *Hybrid learning*, menurut Snart, J.A (2010) merupakan sebuah metode yang menggabungkan dua jenis pembelajaran, yaitu daring (PJJ) dan tatap muka (PTM). Artinya, proses pembelajaran dilaksanakan dengan cara membagi tim ke dalam dua kelompok, belajar di rumah secara daring dan di sekolah secara langsung.

Selama masa pandemi ada beberapa program pendidikan politik yang memang dilihat dari ketercapaian tujuannya harus dilakukan secara offline karena kantor DPD PKS ini memang sempat ditutup selama 2 minggu lamanya dari tanggal 1 hingga 14 Juli 2021 silam. Penutupan tersebut merupakan tindakan preventif untuk menekan laju penyebaran covid-19 di Kota Bogor. Selama penutupan dilakukan seluruh kegiatan pertemuan rapat partai tidak diperkenankan. Pihak Sekretariat juga melakukan penyemprotan desinfektan, di seluruh ruangan di kantor yang berlokasi di Kebon Pedes Tanah Sareal tersebut. Ketua DPD PKS Kota Bogor H. Atang Trisnanto, S.Hut, M.Si yang juga selaku Ketua DPRD Kota Bogor, memperkuat pernyataan Budi tentang informasi penutupan tersebut.

“Penutupan saat itu sesuai dengan Surat Edaran dari Dewan Pengurus Wilayah PKS Jawa Barat, dan kebijakan pemerintah untuk menekan laju penyebaran virus Covid-19. Sangat diperlukan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk menanggulangi ini. Penutupan ini

salah satu ikhtiar yang saat itu kami lakukan, ”. (Wawancara: Atang Trisanto Ketua DPD PKS Kota Bogor, 17 Mei 2022).

Atang melanjutkan bahwa, penutupan tersebut tidak mudah, mengingat selama ini kantor PKS jadi pusat aktivitas struktur PKS. Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Dedi Mulyono, S.P, M.Si Sekretaris Umum DPD PKS Kota Bogor.

”Praktis seluruh kegiatan operasional harian akan dihentikan untuk sementara waktu. Seluruh koordinasi kepartaian akan kami maksimalkan melalui berbagai metode lainnya, ”. (Wawancara Dedi Mulyono, Ketua UPA dan SekUm DPD PKS Kota Bogor, 17 Mei 2022).

Namun penutupan tersebut jadi pemicu konsep pendidikan baru yaitu dengan mengundang beberapa kader dan masyarakat terpilih untuk ke kantor DPD PKS Kota Bogor tetapi pertemuan tersebut dibagi beberapa sesi karena secara peraturan memang tidak boleh diselenggarakan dengan kuota pertemuan 100% meski aula DPD PKS Kota Bogor ini cukup luas dengan kapasitas penampungan maksimal 200 orang, selama masa pandemi hanya boleh digunakan dengan kuota maksimal 30 orang. DPD PKS Kota Bogor selama masa pandemi dalam beberapa kesempatan juga bekerja sama dengan pihak Puskesmas Pondok Rumput untuk membuka layanan tes antigen untuk seluruh peserta yang akan mengikuti kegiatan pembinaan, selain itu juga tiap orang yang masuk dalam kantor wajib *check-in* dengan *barcode* yang telah disediakan serta tentu saja protokol kesehatan yang ketat seperti mencuci tangan dan memakai masker.

Masalah selanjutnya yang dapat ditemukan dari penerapan pendidikan tatap muka terbatas adalah membengkaknya anggaran pendidikan politik, meski tidak dibuka dengan pasti diakui oleh Pak Budi bahwa anggaran pendidikan politik ternyata tidak terlalu membengkak selama masa pandemi, tentu saja dengan kondisi yang ada keuangan partai cukup terganggu, hal yang sama terjadi oleh para anggota dan sumbangan yang biasanya diberikan oleh beberapa kader apalagi PKS sebagai partai kader tentu saja tidak bisa mengurangi intensitas pendidikan begitu saja karena setidaknya satu kali dalam seminggu terdapat kegiatan pembinaan kepada

anggota pendukung khususnya karena bagi PKS, pendidikan atau pembinaan itu *core* dari partai ini, maka dari itu alokasi anggaran yang lebih efektif menjadi sangat penting, seperti biasanya setelah kegiatan terdapat nasi box atau snack maka selama pandemi sudah tidak dianggarkan, diganti dengan layanan antigen yang wajib bagi tiap anggota yang hadir.

B. Media Sosial dalam Pendidikan Politik Kemasyarakatan Selama Masa Pandemi

Ketika perkembangan teknologi semakin pesat, terutama di bidang teknologi informasi berbasis internet maka peran media komunikasi semakin penting. Oleh karena itu, sekarang media telah menjadi salah satu kebutuhan utama bagi setiap orang. Hal ini seiring dengan ditemukannya perangkat-perangkat media yang berbasis internet, sehingga informasi menjadi sesuatu yang mudah ditemukan di belahan dunia ini, dengan mengakses melalui internet mengenai informasi, hiburan, pendidikan, politik, ekonomi dan lain-lain. Berdasarkan fenomena tersebut, komunikasi yang pada awalnya hanya sebatas proses interaksi personal secara *face-to-face*, kini berkembang secara online berbasis internet. Dalam hal ini, salah satu komunikasi berbasis internet yang banyak digunakan adalah media sosial. Media sosial adalah sebuah media online. Dengan hadirnya media berbasis internet (media online) tersebut menunjukkan telah terjadi pergeseran arah penggunaan media komunikasi, yang semula bersifat klasik (media elektronik dan cetak) dan kini mengalami perubahan kepada media baru (*new media*) berbasis internet yang menjadi saluran akses media sosial dalam berbagai bidang, yaitu pendidikan, budaya, sosial, ekonomi, hukum, juga politik, misalnya digunakan di dalam kampanye pemilu untuk mensosialisasikan visi, misi, dan program kerja seorang kandidat kepala daerah misalnya.

Media sosial dijadikan sebagai strategi pendidikan politik masih relatif baru dan menjadi fenomena hangat hingga kini. Misalnya, yang paling mendapat sorotan, yaitu ketika kampanye politik kandidat presiden Amerika Serikat, Barack Obama dan tim suksesnya pada 2008 menggunakan media baru untuk menyebarkan informasi seputar program dan kegiatan kampanye dalam rangka menggalang simpati dan dukungan masyarakat Amerika Serikat pada saat itu. Di Indonesia, penggunaan media sosial sebagai alat

komunikasi politik yang paling marak ketika pemilihan presiden Republik Indonesia pada 2014.

Maraknya media sosial di dunia maya dalam kampanye Pilpres 2014 berkaitan dengan semakin banyaknya pengguna internet di negeri ini. Studi Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menemukan “pengguna internet di Indonesia meningkat sekitar 20-30 persen, yaitu menjadi 80 juta orang pada akhir 2013. Hal ini berarti pertumbuhannya mencapai 33,3%”. Varian media sosial yang tengah berkembang dan banyak diminati orang adalah Facebook, Twitter, WhatsApp, Youtube, dan sebagainya. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan internet. Dengan demikian, media sosial sebagai sarana komunikasi memiliki peran membawa orang (penggunanya) untuk berpartisipasi secara aktif dengan memberi kontribusi dan *feedback* secara terbuka, baik untuk membagi informasi maupun memberi respon secara online dalam waktu yang cepat.

Pengaruh media sosial dalam dunia politik khususnya dalam hal pendidikan politik sangat penting bagi institusi politik untuk berpartisipasi aktif dalam melaksanakan tanggung jawab dalam ranah politik yang berbasis media sosial, terutama dalam masa pandemi seperti saat ini. Media sosial selanjutnya digambarkan sebagai sarana ideal dan basis informasi untuk mengetahui opini publik tentang kebijakan dan posisi politik, selain untuk membangun pengetahuan politik dari pendidikan politik kemasyarakatan.

Dari hasil penelusuran ditemukan bahwa DPD PKS Kota Bogor memiliki beberapa sosial media yang aktif dan cukup informatif. Itu karena pergeseran branding yang dilakukan PKS karena kini melihat potensi dari sosial media yang dapat membantu branding PKS yang cenderung murah dan memiliki jangkauan tertentu seperti generasi yang melek informasi dari pemberdayaan internet. Ada beberapa sosial media yang saat ini sedang dikelola oleh DPD dan Fraksi PKS di Kota Bogor, berikut daftarnya.

Tabel 8. media sosial yang dimiliki oleh PKS Kota Bogor

No.	Jenis Sosial Media	Judul	Jumlah Audiens
-----	--------------------	-------	----------------

1.	Youtube	PKSTV DPRD Kota Bogor	303 Subscribers
2.	Youtube	PKSTV Kota Bogor	3800 Subscribers
3.	Instagram	@pkskotabogor	2604 followers
4.	Instagram	@fraksipksbogor	3357 followers
5.	Facebook	PKS Kota Bogor	1542 followers
6.	Facebook	Fraksi PKS Kota Bogor	7010 followers
7.	Tiktok	fraksipksbogor	436 followers
8.	Spotify	Fraksi PKS Kota Bogor	-
9.	Email	kotabogor.fpks@gmail.com	-

Sumber: Dokumen DPD PKS Kota Bogor, 2021.

a. Youtube PKSTV dan Fraksi DPRD Kota Bogor

YouTube dirancang sebagai situs berbagi video yang sangat populer terutama dikalangan generasi muda. Hampir sebagian besar generasi muda menggunakan YouTube dalam kehidupan sehari-hari mereka. Menurut datareportal.com, sebesar 93.8% masyarakat Indonesia menjadikan YouTube sebagai salah satu sosial media yang sering digunakan. Melalui YouTube, masyarakat juga memiliki kekuatan untuk terhubung dengan penonton dalam jumlah yang besar dan beragam. Lebih dari 1,9 miliar orang login ke YouTube setiap bulannya. YouTube adalah platform terbuka. Dilansir dari situs resminya, YouTube membagikan nilai yang mereka miliki. YouTube memiliki nilai yang didasarkan pada empat kebebasan utama: kebebasan berekspresi, kebebasan mendapatkan informasi, kebebasan menggunakan peluang, dan kebebasan memiliki tempat berkarya, hal tersebut memungkinkan PKS menggunakan platform ini sebagai bagian dari kampanye politik maupun pendidikan politik.

Dari hasil penelusuran sosial media diatas ada perbedaan dari siapa yang memegang kendali dan bertanggung jawab terhadap muatan pendidikan politik di masing-masing saluran media sosial, contohnya Youtube, karena terdapat media sosial yang di kembangkan oleh fraksi dan DPD Kota Bogor, namun secara umum muatannya tidak jauh berbeda, bahkan sama seperti program PLC yang di upload di dua kanal Youtube yang berbeda.



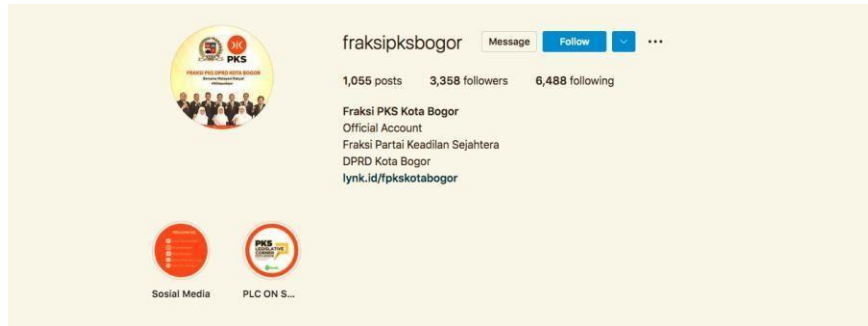
Gambar 19. Header Akun Youtube Fraksi PKS Bogor (Sumber: Youtube PKS Kota Bogor, 2022).



Gambar 20. Header Akun Youtube PKS Bogor (Sumber: Youtube PKS Kota Bogor, 2022).

b. Instagram PKS Kota Bogor dan Fraksi DPRD Kota Bogor

Instagram adalah sebuah aplikasi dari Smartphone Yang khusus untuk media sosial yang merupakan salah satu dari media digital yang mempunyai fungsi hampir sama dengan twitter, namun perbedaannya terletak pada pengambilan foto dalam bentuk atau tempat untuk berbagi informasi terhadap penggunanya. Instagram juga dapat memberikan inspirasi bagi penggunanya dan juga dapat meningkatkan kreatifitas, karena Instagram mempunyai fitur yang dapat membuat foto menjadi lebih indah, lebih artistik dan menjadi lebih bagus (Dwi 2012)



Gambar 21. Bio akun instagram @fraksipksbogor (Sumber: Instagram PKS Kota Bogor, 2022).

Akun instagram resmi Fraksi PKS Kota Bogor menggunakan nama pengguna @fraksipksbogor memiliki 3358 pengikut di Instagram dengan 1055 post. Akun tersebut cukup aktif dalam memberikan informasi mengenai kegiatan para kader maupun aleg dari fraksi PKS, secara umum cukup informatif dan sering membuat berbagai kegiatan seperti lomba, donor darah, peringatan hari besar dan informasi mengenai DPP PKS.



Gambar 22. Bio akun instagram @pkskotabogor (Sumber: Instagram PKS Kota Bogor, 2022).

Akun instagram resmi DPD PKS Kota Bogor dapat ditemukan di @pkskotabogor. Akun ini memiliki 2615 pengikut dengan 1237 postingan, umumnya postingan tentang kiprah partai di lingkup Kota Bogor, dan tokoh utamanya seperti Atang Trisnanto dan Adityawarman Adil yang menjadi bakal calon Walikota dari PKS Kota Bogor, tidak sedikit juga posting tentang tokoh DPP PKS seperti Dr. Salim yang menjadi Ketua Majelis Syuro PKS.

c. Facebook PKS Kota Bogor dan Fraksi DPRD Kota Bogor

Facebook merupakan jejaring sosial atau sosial media yang memungkinkan para pengguna dapat menambahkan profil dengan foto, kontak, ataupun informasi. Penggunaanya dapat bergabung dalam komunitas untuk melakukan koneksi dan berinteraksi dengan pengguna lainnya. Fitur yang ditawarkan facebook sebagai situs jejaring sosial atau media sosial membuat banyak orang menggunakannya. Facebook adalah website jaringan sosial dimana para pengguna dapat bergabung dalam komunitas seperti kota, kerja, sekolah, dan daerah untuk melakukan hubungan dan berinteraksi dengan orang lain. Orang juga dapat menambahkan teman-teman mereka, mengirim pesan, dan memperbarui profil pribadi agar orang lain dapat melihat tentang dirinya (Kusumaningtyas, 2010).



Gambar 23. Bio akun Facebook Fraksi PKS Kota Bogor (Sumber: Facebook PKS Kota Bogor, 2022).



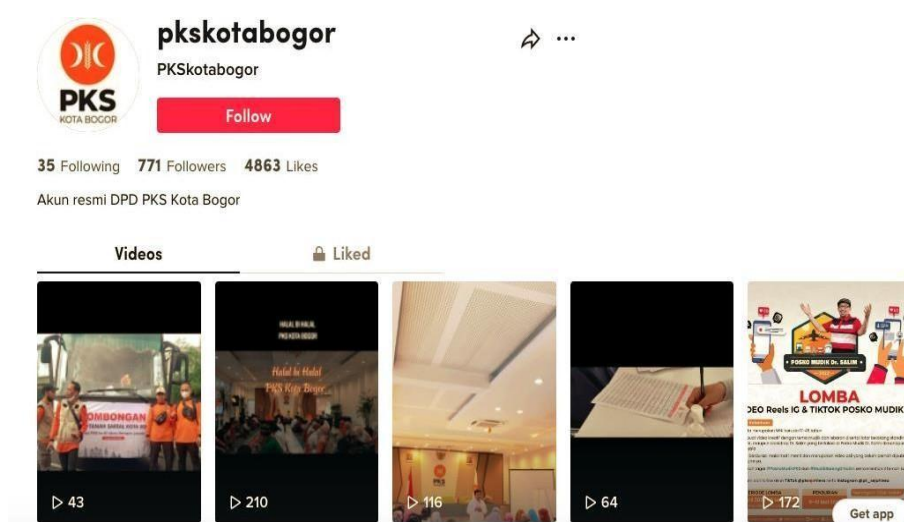
Gambar 24. Bio akun Facebook PKS Kota Bogor (Sumber: Facebook PKS Kota Bogor, 2022).

Meski keduanya sama-sama identik dengan PKS di Kota

Bogor, akun Facebook resmi milik DPD PKS Kota Bogor dan Fraksi PKS DPRD Kota Bogor memiliki tema konten yang ada berbeda, sehingga menariknya peneliti melihat adanya konten yang minim ‘tabrak’ antar media tersebut.

d. Tiktok PKS Kota Bogor

Tik Tok adalah sebuah aplikasi jejaring sosial dan platform video music dimana pengguna bisa membuat, mengedit, dan berbagi klip video pendek lengkap dengan filter dan disertai musik sebagai pendukung. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat membuat video pendek yang unik dengan cepat dan juga mudah untuk dibagikan dengan teman dan ke seluruh dunia. Namun, karena semakin berkembangnya aplikasi ini, kini pengguna juga bisa membuat video dengan durasi yang lebih panjang yaitu sekitar 60 detik atau yang setara dengan 1 menit (Winarso, 2021).



Gambar 25. Bio akun Tiktok PKS Kota Bogor (Sumber: tiktok PKS Kota Bogor, 2022).

Akun tiktok DPD PKS Kota Bogor dapat ditemukan di pkskotabogor, didalamnya memuat konten video yang lebih singkat dari Youtube, meski demikian muatan dalam konten tersebut tetap santai dan informatif.

e. Spotify Fraksi PKS Kota Bogor

Spotify adalah salah satu layanan streaming musik digital,

mulai dari lagu lokal sampai internasional yang bisa dibilang cukup lengkap. Di aplikasi ini, tidak hanya akan mendengarkan musik, kita juga bisa menampilkan lirik di aplikasi Spotify pada setiap lagunya untuk memudahkan Anda mengikuti musiknya. (Dzikri Azqiya 2021) Bukan hanya musik, Spotify juga menyediakan fitur podcast. Di fitur ini Anda bisa mendengarkan diskusi atau obrolan dari orang yang membuat konten.



Gambar 26. Bio akun Spotify Fraksi PKS Kota Bogor (Sumber: Spotify PKS Kota Bogor, 2022).

Akun spotify Fraksi PKS Kota Bogor memuat berbagai edukasi mengenai respon dan sikap Fraksi PKS DPRD Kota Bogor dalam berbagai keputusan yang terjadi dalam Pemerintahan Kota Bogor. Konsep yang digunakan dalam akun ini adalah penyampaian informasi melalui konten podcast, dalam penelusuran peneliti menemukan fakta bahwa akun ini pertama kali upload konten pada bulan April 2021 dan isinya adalah dokumentasi audio dari program Talkshow yang bernama PKS Legislative Corner (PLC) sebanyak 18 episode.

f. E-mail Fraksi PKS Kota Bogor

Email adalah singkatan dari Elektronik Mail atau dalam bahasa Indonesia disebut Surat Elektronik merupakan sarana dalam mengirim surat yang dilakukan melalui media internet. Media internet yang dimaksud bisa melalui komputer atau handphone yang memiliki akses internet. Pada umumnya mengirim surat biasa akan dikenakan biaya (membeli perangko) namun pada Surat Elektronik hanya

dibutuhkan sambungan internet. Email adalah alamat resmi kita di dunia maya. Dengan menggunakan email kita dapat terhubung dalam berbagai kegiatan internet, seperti bergabung di situs jejaring sosial semisal Facebook dan twitter maka saat pendaftaran akan membutuhkan email. Saat ini, Email telah berkembang hingga memiliki fungsi yang sangat beragam. Mengirim file, foto, video dan Chat dengan teman dan keluarga menjadi lebih mudah (Hanafi, 2019).

PKS menggunakan alamat email dengan domain yang berasal dari google. Alamat email Fraksi PKS Kota Bogor adalah kotabogor.fpk@gmail.com. Dimana dengan alamat tersebut masyarakat dapat mengirim atau menerima pesan mengenai beragam informasi yang ingin ditanyakan. E-mail merupakan jawaban jika masyarakat ingin memiliki informasi atau memberikan aspirasi secara online.

C. Menentukan Isu Pendidikan Politik PKS di Kota Bogor

Pada dasarnya materi yang diusung dan kurikulum untuk para kader pada saat masa sebelum pandemi dan selama masa pandemi itu sama, tetapi perbedaan lebih kepada sarana, prasarana dan bobot materi tiap jenjang pendidikan kader.

“Sama saja seperti SD, SMP, SMA. Kita sama-sama belajar matematika, tetapi matematika tiap jenjang itu kan berbeda karena tentu semakin tinggi jenjang materi yang dipelajari semakin mendalam dan intensif.” - (Wawancara Erry Nugroho, Kader PKS Kota Bogor, 17 Mei 2022).

Dalam tabel yang ada di AD/ART, disebutkan bahwa sesuai kurikulum TOP/UPA, PKS memiliki beberapa jenjang dimana tiap jenjangnya memiliki beberapa bobot isu pembelajaran yang diusung. Berikut tabelnya:

Jenis	Sub-Jenis	Definisi dan Jenjang Kaderisasi
Kader Pendukung (Pemula)	Pemula (Pemula Terdaftar)	Kader-kader baru harus menyelesaikan pelatihantingkat pertama.
	Siaga (Pemula Terbina)	Kategori kedua ini menyelesaikan TOP/UPA 1 dan 2. Mereka juga diminta menghadiri Taklim Rutin Kader (TRK). Jika mereka berhasil lulus di tahap ini, mereka akan diberi sertifikat yang disebut SKAP/KTAP (Surat Kelulusan Anggota Pemula/Kartu Tanda Anggota Pemula) agar kemudian bisa menempuh pelatihan selanjutnya yang disebut Training Dasar (TD) 1.
Kader Penggerak	Muda	Yakni kader yang berhasil menempuh TD 1 dan memperoleh rekomendasi dari murabbi (instruktur) untuk menjadi Kader Muayyid. Di samping wajib mengikuti TRK dan melaksanakan kegiatan-kegiatan PKS, kader tingkatan ini juga diminta untuk mengambil KISP 1 (Kajian Ilmu Sosial Politik).
	Pratama	
Kader Pelopor	Madya	Kader pada jenjang ini wajib mengikuti pelatihan dan diskusi keagamaan sebagai kader muda, tapi substansi materi dan intensitas pelatihannya lebih tinggi. Kader jenis ini juga diminta untuk menempuh Training Lanjutan (TL) 1.
	Dewasa	Kader pada tingkatan ini tak hanya wajib mengikuti pelatihan dan diskusi keagamaan sebagai Madya, tapi juga harus menempuh TL 2. Murabbi yang memiliki hal memberi atau tidak sebuah rekomendasi untuk naik ke jenjang selanjutnya.
	Utama	Kader pada jenjang ini berhasil menyelesaikan semua pelatihan di tiap tingkat. Kader pada jenjang ini memiliki hak menempati posisi-posisi tinggi dan strategi didalam partai.

Sumber:

AD/ART PKS, 2019.

Pada kategori jenjang pemula, kader-kader baru harus menyelesaikan pelatihan tingkat pertama, untuk tingkatan yang lebih tinggi yaitu jenjang siaga, Kategori kedua ini harus menyelesaikan TOP/UPA 1 dan 2. Mereka juga diminta menghadiri Taklim Rutin Kader (TRK). Jika mereka berhasil lulus di tahap ini, mereka akan diberi sertifikat yang disebut SKAP/KTAP (Surat Kelulusan Anggota Pemula/Kartu Tanda Anggota Pemula) agar kemudian bisa menempuh pelatihan selanjutnya yang disebut Training Dasar (TD) 1.

Naik ke tingkatan selanjutnya ada kader penggerak yang dibedakan

menjadi 2 kategori yakni Muda dan Pratama, kategori ini merupakan kader yang berhasil menempuh TD 1 dan memperoleh rekomendasi dari murabbi (instruktur) untuk menjadi Kader Muda. Di samping wajib mengikuti TRK dan melaksanakan kegiatan-kegiatan PKS, kader penggerak ini juga diminta untuk mengambil KISP 1 (Kajian Ilmu Sosial Politik).

Untuk tingkatan paling tinggi yaitu kader pelopor, kategorinya dibedakan menjadi Madya, Dewasa dan Utama. Untuk kategori Madya, Kader pada jenjang ini wajib mengikuti pelatihan dan diskusi keagamaan sebagai kader muda, tapi substansi materi dan intensitas pelatihannya lebih tinggi. Kader jenis ini juga diminta untuk menempuh Training Lanjutan (TL) 1. Untuk kategori dewasa, Kader pada tingkatan ini tak hanya wajib mengikuti pelatihan dan diskusi keagamaan sebagai Madya, tapi juga harus menempuh TL 2. Murabbi yang memiliki hal memberi atau tidak sebuah rekomendasi untuk naik ke jenjang selanjutnya. Lalu untuk kategori Utama, Kader pada jenjang ini berhasil menyelesaikan semua pelatihan di tiap tingkat. Kader pada jenjang ini memiliki hak menempati posisi-posisi tinggi dan strategi didalam partai.

PKS Kota Bogor menolak membeberkan secara spesifik isi dari materi tiap jenjang, tetapi menurut Dedi Mulyono gambaran besarnya jika anggota pendukung maka materi yang diusung adalah keagamaan dan kebangsaan, semakin naik jenjangnya maka bobot materi kurikulum semakin meningkat seperti ketika berbicara kontribusi peradaban maka anggota pelopor lebih banyak porsinya dibanding anggota pendukung, termasuk bobot materi tentang keagamaan pendidikan politik anggota pelopor yang lebih dalam dan dipertajam dibanding dengan anggota pendukung. Menurut Erry Nugroho PKS mengedepankan nilai-nilai keagamaan tanpa luput untuk memberikan pemahaman nilai-nilai pancasila dalam pendidikan untuk kader, karena tiap bobot pendidikan politik PKS memiliki pemahaman agama dan kenegaraan yang kuat.

Hal ini sejalan dengan teori yang dimiliki Djiwandono (dalam Pasaribu, 2017: 57) yang menyatakan bahwa pendidikan politik merupakan suatu proses penyampaian budaya politik bangsa yang mencakup cita-cita politik dan norma-norma operasional dan sistem organisasi politik yang berdasarkan nilai-nilai pancasila penting bagi seluruh rakyat, seluruh

warga.”. Dalam pendidikan politik dapat terlihat bagaimana budaya politik suatu bangsa ditampilkan, terutama budaya politik Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Khusus untuk masyarakat secara umum, PKS tidak membatasi apapun mengenai muatan atau isu yang diusung untuk dipelajari, semua isu yang diangkat dalam pendidikan politik memiliki porsinya masing-masing sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat maupun pemerintahan saat itu. Menurut Gunawan, Staf Ahli Fraksi PKS Kota Bogor, PKS menganggap meski covid-19 ini merupakan isu yang mudah untuk diangkat karena selalu hangat dan memiliki banyak kajian yang dapat ditelaah sebagai tema dalam pendidikan politik di berbagai metode, isu seperti kesejahteraan masyarakat, kekerasan pelajar, perizinan usaha dan isu diluar pandemi lainnya adalah muatan yang tidak kalah penting, karena semua pekerjaan partai politik di masa pandemi tidak berhenti soal pandemi, masih banyak ‘PR’ bagi pemerintah, fraksi dan partai politik dalam menyelami dan memperbaiki Kota Bogor bersama-sama. Dari hal tersebut peneliti mengambil contoh pendidikan politik yang dapat diakses di Youtube PKSTV yang berjudul “Covid-19 Kota Bogor Kritis, Sudahkah Pemkot Lakukan Langkah Taktis ?”.



Gambar 27. Banner PLC (Sumber: Youtube Fraksi PKS Kota Bogor, 2022).

Pendidikan politik dengan tema ini adalah sesuatu yang sedang terjadi di masyarakat, karena kasus covid-19 di Kota Bogor pada saat pendidikan politik tersebut diselenggarakan mengalami ledakan yang cukup signifikan. Berdasarkan data dari Pemerintah Kota Bogor, jumlah kasus Covid-19 yang saat itu diisolasi menyentuh angka 4941. Saat itu juga Bed Occupancy Ratio

(BOR) dari 21 Rumah Sakit yang ada di Kota Bogor sudah menyentuh angka 84% atau dari 1.099 tempat tidur menyisakan 176 tempat tidur. Semenjak tanggal 3 Juli 2021, atau 4 hari sebelum materi tersebut dibahas Pemerintah Kota Bogor memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang mengikuti arahan PPKM Darurat di Jawa dan Bali yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Kemudian, pusat isolasi di setiap wilayah mulai coba dibuka, baik di tingkat wilayah kecamatan dan kelurahan maupun pusat isolasi di tingkat Kota, seperti di BPKP Ciawi, asrama IPB, Rumah Sakit Lapangan, BNN Lido, dll. Selain itu, upaya vaksinasi gencar dilakukan di Kota Bogor agar persentase warga Kota Bogor yang sudah mendapatkan vaksin Covid-19 semakin meningkat. Materi ini mendedah tentang sejauh mana upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor akan efektif serta sejauh mana kinerja Pemerintah Kota Bogor dalam penanganan Covid-19 di Kota Bogor.

Meski demikian, isu kesehatan masih menjadi hal yang cukup dominan seperti pelayanan kesehatan masyarakat, kebijakan PPKM serta penanganan covid- 19 disamping isu pemerintahan dan legislasi. DPD Kota Bogor tidak asal dalam memberikan tema dalam setiap kegiatan pendidikan politik kemasyarakatannya. Dalam memberikan pendidikan politik khususnya pendidikan pemilih tentang pendidikan politik mengacu dalam 4 (empat) tahapan, yaitu:

a. Riset

Berdasarkan temuan di lingkungan DPD PKS Kota Bogor telah melakukan serangkaian kegiatan mencari data sebelum menyusun program kerja pendidikan politik masyarakat. Tindakan pertama yang harus dilakukan praktisi Humas bersama Staf Ahli sebelum menyusun program kerjanya adalah memahami situasi atau masalah yang ada. Praktisi Humas harus melakukan riset/penelitian terlebih dahulu untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh atas masalah yang dihadapi sebelum mengangkat tema tersebut untuk menjadi bahan pendidikan politik ke publik (Morissan, 2008).

b. Perencanaan Konsep

Setelah menemukan masalah yang menjadi topik yang akan diimplementasikan ke publik dari suatu riset yang telah dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah menetapkan rencana atau konsep yang

akan dipakai dalam rangka penyampaian ke publik. Penentuan konsep merupakan bagian penting dalam penyampaian pendidikan politik, karena merupakan rangkaian yang menentukan bagaimana konsep yang efektif dilakukan setelah pengumpulan data riset mengenai topik pendidikan. Ada beberapa konsep yang digunakan PKS Kota Bogor dalam rangka menyampaikan pendidikan politik kepada masyarakat umum.

- 1) Bakti Sosial
- 2) Advokasi Warga
- 3) Hari Aspirasi
- 4) PKS Legislative Corner
- 5) Public Hearing
- 6) Publikasi Buletin

Tiap tema yang diusung memiliki penyampaian konsep yang berbeda sesuai dengan hasil riset yang dilakukan oleh Humas dan Staf Ahli sehingga dalam penyampaian menjadi lebih efektif.

c. Komunikasi

Setelah melakukan riset dan menentukan konsep, Langkah selanjutnya yaitu komunikasi atau pelaksanaan program. Humas DPD PKS telah membuat perencanaan yang disusun dengan baik sebagai hasil pemikiran yang matang berdasarkan data yang telah diperoleh, kemudian dikomunikasikan. Hal itu sejalan dengan teori yang mengatakan bahwa seorang Humas harus mampu mengkomunikasikan pelaksanaan program sehingga dapat mempengaruhi sikap publik yang kemudian mendorong mereka untuk melakukan tindakan (Rachman, 2001).

Menurut Budi Bahtiar selaku Humas PKS Kota Bogor, komunikasi disini bisa dianggap dua hal, yang pertama komunikasi untuk mengajak audiens untuk datang dan mengikuti rangkaian acara pendidikan politik, yang kedua adalah penyampaian tema pendidikan politik yang diberikan untuk audiens yang dalam hal ini masyarakat, kedua hal tersebut memiliki peran yang sangat penting demi terciptanya kelancaran di acara pendidikan politik yang sedang diselenggarakan.

Sebelum pandemi, PKS biasanya menemui langsung

masyarakat melalui berbagai pertemuan, misalnya di masjid dan majelis ta'lim, hal tersebut lumrah bagi PKS sebagai partai Islam untuk menunjukkan identitas keislamannya, berbeda saat selama pandemi strategi dalam mengajak masyarakat untuk mengikuti acara ini adalah dengan model *direct message* melalui whatsapp dan telegram, hal ini dapat mudah dilakukan dan cakupannya cukup luas karena PKS pada tiap kegiatan memiliki database mengenai nama dan nomor telepon peserta, sehingga diharapkan peserta pendidikan politik ini dapat mendalami materi secara kontinyu.

d. Evaluasi

Setelah merealisasikan acara pendidikan politik kepada masyarakat, selanjutnya Humas dan Staff Ahli DPD PKS Kota Bogor yang menjadi panitia melakukan kegiatan evaluasi tentang acara pendidikan politik yang telah dilaksanakan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi masukan yang berharga bagi kegiatan pendidikan politik selanjutnya. Evaluasi tersebut mencakup mengenai temuan hambatan mengenai sarana dan prasarana, bobot tema serta antusiasme masyarakat yang mengikuti.

BAB VI

PENUTUP

Pada bab terakhir atau bab penutup ini peneliti akan menarik kesimpulan dari pemaparan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Kemudian, peneliti juga akan memberikan saran yang ditujukan untuk PKS sebagai partai politik yang memiliki banyak program pendidikan politik untuk kader maupun masyarakat agar tetap dapat menyelenggarakan program di tengah kondisi pandemi sekalipun. Kesimpulan ini diharapkan dapat membantu pembaca agar dapat memahami dan menemukan inti pembahasan dari rumusan masalah penelitian ini.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian *Pengalaman Pendidikan Politik Partai Keadilan Sejahtera Pada Era Pandemi Covid-19 di Kota Bogor* maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, partai PKS sebagai partai kader dimana seluruh kegiatan rekrutmen politik maupun pengenalan terhadap masyarakat melalui kegiatan pendidikan politik, itu karena PKS menganggap pendidikan politik adalah *core* atau inti dari partai. Bagi DPD PKS Kota Bogor, tidak ada yang bisa menghalangi partai dalam memberi berbagai pelayanan masyarakat, kader maupun pendidikan politik itu sendiri termasuk pandemi covid-19 yang sempat mengganas beberapa waktu lalu. Untuk itu PKS menerapkan berbagai metode komunikasi atau sistem pendidikan politik dengan tujuan agar penyampaian informasi mengenai kepartaian atau materi pendidikan tidak mengalami hambatan.

PKS memiliki strategi khusus mengenai pendidikan politik oleh kader melalui sistem Unit Pembinaan Anggota, yang merupakan sistem pembinaan untuk anggota yang sifatnya wajib bagi para pengurus, kader maupun anggota. Sistem pendidikan ini rutin dalam rentang waktu tertentu. Dalam UPA, kader PKS diajarkan untuk melakukan kegiatan yang bersifat rohani dan jasmani seperti mengaji dan kontrol ibadah hingga olahraga. Namun, lebih dari itu anggota selama masuk dalam kegiatan UPA juga dipastikan kegiatannya dalam kemasyarakatan sebagai bentuk *personal branding* hal tersebut juga menjadi salah satu edukasi politik didalam masyarakat agar PKS

senantiasa berkontribusi dalam setiap lapisan masyarakat melalui UPA maupun kegiatan kader sehari-hari di lingkungannya. Pada masyarakat, strategi pendidikan yang digunakan adalah dengan berbagai pelayanan dan kegiatan pendidikan di masyarakat secara daring selama masa pandemi.

DPD PKS dalam penerapan pendidikan selama masa pandemi banyak melakukan perubahan dalam memaksimalkan media pendidikan politik agar tetap berjalan meski dalam kondisi pandemi. Pada dasarnya program pendidikan secara online khusus digunakan untuk memberikan pendidikan politik yang diusung untuk masyarakat secara umum, yaitu dengan dokumentasi kegiatan penerimaan aspirasi, penyampaian informasi, pengetahuan mengenai kelembagaan di fraksi hingga isu-isu terkini guna menjawab dan memberikan pemahaman politik mengenai apa isu yang terjadi di sekitar masyarakat, hal tersebut dikemas dengan cara-cara terkini melalui podcast maupun talkshow daring yang dapat diakses di youtube PKSTV dan spotify PKS Kota Bogor. Dari hasil penelusuran ditemukan bahwa DPD PKS Kota Bogor juga memiliki beberapa sosial media yang aktif dan cukup informatif. Sementara untuk pendidikan kader, PKS menggunakan skema *hybrid learning* dengan menerapkan beberapa titik kumpul misalnya saat acara pendidikan politik untuk Pengurus Koordinator tingkat RT, biasanya dilakukan di satu rumah dengan pertemuan yang terbatas, misal hanya dilakukan maksimal 10 orang dirumah salah satu anggota lalu „nonton bareng“ narasumber yang telah disiapkan oleh DPD PKS Kota Bogor untuk mendengar arahan dari pimpinan.

Sedangkan untuk isu yang diusung, materi dan kurikulum untuk para kader pada saat sebelum pandemi dan selama masa pandemi tidak memiliki perbedaan yang berarti, karena perbedaan tersebut lebih kepada sarana, prasarana dan bobot materi tiap jenjang pendidikan kader memiliki perbedaan, lalu mengenai isu yang diusung untuk masyarakat secara umum, PKS tidak membatasi apapun mengenai muatan atau isu yang diusung untuk dipelajari, semua isu yang diangkat dalam pendidikan politik memiliki porsinya masing-masing sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat maupun pemerintahan saat itu.

B. Saran

Tak ada gading yang tak retak, kira-kira seperti itulah peribahasa yang cocok untuk ditempatkan pada bagian ini, karena meski peneliti menilai bahwa bergaya metode yang ditawarkan PKS Kota Bogor adalah metode yang dinamis namun ada beberapa celah kekurangan yang dapat peneliti temukan.

1. Banyaknya platform sosial media yang digunakan PKS dapat menjanjikan keleluasaan dalam menerapkan berbagai metode pendidikan politik, tetapi kenyataannya banyak pula platform yang tidak dikelola secara maksimal, meski Bapak Gunawan, SE. Staf Ahli PKS Fraksi Kota Bogor menyatakan bahwa kekurangan SDM yang fokus terhadap penerapan teknologi menjadi hambatan dalam pengelolaan sosial media parpol, tetapi sebaiknya PKS Kota Bogor dapat memaksimalkan Instagram, Tiktok dan Youtube karena ada potensi trending yang sangat tinggi jika ketiga platform tersebut dapat dimaksimalkan dengan baik dan tim yang solid.
2. Melihat potensi pekerjaan di masa depan dengan skema WFA (*Work from Anywhere*) maka PKS harus memiliki solusi terhadap kegiatan kaderisasi agar dapat dilakukan secara daring tanpa harus mengurangi esensi dan efektifitas pertemuan. Dilihat dari situasi yang terjadi, *grassroot* adalah pihak yang cukup kesulitan dalam menerima informasi secara daring, maka dari itu partai setidaknya harus memberikan '*moda*' khususnya bagi anggota pendukung yang disebut memiliki kendala kuota atau pulsa internet yang menjadi unsur penting dalam konsep pendidikan daring mengingat bagi PKS masyarakat harus dapat merasakan hadirnya partai di lini terbawah sekalipun.

Daftar Pustaka

- al-Banna, Gamal. 1979. *Revolusi al-Qu'ran Jamâl al-Bannâ sebagai Arah Baru*. Chicago: The University of Chicago Pres.
- Armani, Rizal. 2019. *Profil Kota Bogor*. 22 April. <https://kotabogor.go.id/index.php/page/detail/37/biografi-wakil-walikota>.
- Ashar, Ahmad Syaiful. 2011. *Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat*. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Budiarjo, Miriam. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Burke, Peter. 2005. *History and Social Theory*. New York: Polity.
- Creswell, John. 2017. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Newbury Park: Sage.
- Dwi, Bambang Atmoko. 2012. *Instagram Handbook Tips Fotografi Ponsel*. Jakarta: Media Kita.
2021. *Dzikri Azqiya*. 2 Juli. <https://www.leskompi.com/mengenal-aplikasi-spotify/>.
- Edward, Djony. 2006. *Efek Bola Salju PKS*. Jakarta: Syaamil.
- Fadillah, Ichwan Nur. 2017. "Pendidikan Politik Oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kota Pekanbaru Tahun 2015-2016." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau* 1.
- Fanani, Fitrah. 2016. *Pandangan Elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD*. Jakarta: Repository UIN Jakarta.
- Hanafi, Abdul. 2019. *Email*. 11 Oktober. <https://idcloudhost.com/kamus-hosting/email/>.
- Hermawan, Iyep Candra. 2020. "Implementasi Pendidikan Politik Pada Partai Politik di Indonesia." *JPPHK (Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan)* 1.
- Kaligis, Artis. 2016. *Pendidikan Politik Partai Golkar di Kota Tomohon*. Tomohon: Politico: Jurnal Ilmu Politik.
- Kantaprawira, Rusadi. 2006. *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Kartini, Kartono. 1996. *Pendidikan Politik sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung: Madar Maju.
- Katz, Richard. 2006. *Handbook of Party Politics*. Nee York: Sage.
- Kerlinger, Fred. 2000. *Foundations of Behavioral Research*. Orlando: Hartcourt College Publishers.
- Nurhasan Zaidi. *Kumpulan Sikap Dakwah Politik PK; PKS Periode 1998-2005* .

- Bandung: Bandung Harakatuna Publishing.
- Kurniasih, Dewi. 2014. *Pendidikan Politik Kader Partai Persatuan Pembangunan Pada Persiapan Pemilihan Kepala Daerah Kota Cimahi Tahun 2012*. Bandung: Unikom Repository.
- Kusumaningtyas, Ratih Dwi. 2010. *eran Media Sosial Online (Facebook) Sebagai Saluran Self Disclosure Remaja Putri Di Surabaya*. Surabaya: Era Media.
- McNair, Brian. 2007. *An Introduction to Political Communication*. New York: Routledge.
- Morissan. 2008. *Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio & Televisi*. Jakarta: Kencana.
- Muhtadi, Burhanuddin. 2012. *Dilema PKS*. Jakarta: PT. Gramedia Jakarta.
- Omami, Tenti. 2017. "Peran Pendidikan Politik Bagi Perempuan Menurut Prinsip Keadilan dan Kesetaraan Gender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik." *Jurnal Nestor* 2.
- Pamungkas, Sigit. 2011. *Partai Politik : Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.
- Perasso, Valeria. 2021. *Asal Covid-19: Apakah kita perlu tahu dari mana asal virus corona ini?* 25 Juni. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-57590872>.
- PKS, DPP. 2021. *AD/ART 2021*. Jakarta: PKS.
- Poerwandari, Kristi. 1998. *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*. Jakarta: Psikologi UI.
- Prasetyo, Luqman. 2020. *Pendidikan Politik oleh Partai Politik Islam Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kabupaten Purbalingga*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Purwanto, Antonius. 2021. *Kota Bogor: Kota Hujan dan Penyangga Jakarta*. 28 Juni. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/kota-bogor>.
- Rachman, Abdul. 2001. *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung.
- Rahayu, Suci. 2012. *Analisa Peran Partai Politik dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik di DPD PKS Kota Medan*. Medan: Unimed.
- Rianto, Hadi. 2019. "Peranan PKS Dalam Memberikan Pendidikan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Barat 2018." *Untirta Civic Education* 2.
- Ruslan, Utsman Abdul Mu'iz. 2000. *Tarbiyah Siyasiah Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*. Aceh: Era Intermedia.
- Schraw, Gregory. 1996. *Interactive, Compensatory Reading Strategies*. Cambridge: Sage.

- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suryadi, Remi. 2020. *FAQ*. 23 Maret. <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>.
- Wibowo, Arif Prasetyo. 2021. "Peran Partai Keadilan Sejahtera Sebagai Wahana Pendidikan Politik Guna Mengembangkan Nilai-Nilai Pancasila." *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN* 4.
- Winarso, Bambang. 2021. *Apa Itu TikTok dan Apa Saja Fitur-fiturnya?* 8 Juni. <https://dailysocial.id/post/apa-itu-tik-tok>.
- Yusuf, Muri. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Zaidi, Nurhasan. 2007. *Kumpulan Sikap Dakwah Politik PK; PKS Periode 1998-2005*. Bandung: Harakatuna Publishing.

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1. Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Jalan Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 945/Un.10.6/K/KM.05.01/04/2022 Semarang, 27 April 2022
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.
DPD PKS KOTA BOGOR
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "Pengalaman Pendidikan Politik Partai Keadilan Sejahtera Pada Era Pandemi Covid-19 di Kota Bogor" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Muhamad Farhan Maulana
NIM : 1706016043
Semester : X (Sepuluh)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat Tgl/ Lahir : Bandung, 21 Juli 1999
Contact Person : 085228255853
Nama Ayah/ Ibu : Muhamad Yusran
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Taman Tirta Cimanggu blok A3/16 RT05/13 Kel

Mekarwangi Kec. Tanah Sareal Kota Bogor 16168

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang
Republik Indonesia
S. Ag, M.H

Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo

Lampiran 2. Dokumentasi



Wawancara bersama Bpk. Erry Nugroho (Kader PKS Kota Bogor) - 13 Mei 2022



Wawancara bersama Bpk. Budi Bahtiar (Humas Fraksi PKS Kota Bogor) - 14 Mei 2022



Wawancara bersama Bpk. Dedi Mulyono Sekhum dan Ketua UPA PKS Kota Bogor) - 18 Mei 2022



Wawancara bersama Bpk. Untung (Wartawan & Peserta Pendidikan Politik) - 19 Mei 2022



Dokumentasi kegiatan penelitian 2022.



Wawancara bersama Bpk. Rizky (Wartawan & Peserta Pendidikan Politik) - 19 Mei 2022



Wawancara bersama Bpk. Haris (Peserta Pendidikan Politik) - 20 Mei 2022



Wawancara bersama Bpk. Rustam (Peserta Pendidikan Politik PKS) - 22 Mei 2022



Wawancara bersama Ibu Marni (Masyarakat yang di Advokasi PKS) - 22 Mei 2022



Wawancara bersama Bpk. Syahrani (Masyarakat yang di Advokasi PKS) - 24 Mei 2022



Wawancara bersama Bpk. Gunawan (Staff Ahli Fraksi PKS Kota Bogor) - 26 Mei 2022



Wawancara daring bersama Bpk. Fazlur (Kader Nonaktif PKS Kota Bogor) - 28 Mei 2022

Lampiran 3. Draft Wawancara

Berikut ini adalah daftar pertanyaan wawancara penelitian yang diperoleh peneliti di DPD PKS Kota Bogor terkait dengan rumusan masalah dalam penelitian yang berjudul Pengalaman Pendidikan Politik Partai Keadilan Sejahtera Pada Era Pandemi Covid-19 di Kota Bogor.

Daftar pertanyaan berikut ini mengenai informasi umum terkait dengan pendidikan politik di DPD PKS Kota Bogor:

A. Pengurus DPD PKS Kota Bogor

Nama :

No.	Daftar Pertanyaan
1.	<p>a. Strategi penerapan pendidikan politik oleh PKS sebagai upaya peningkatan partisipasi politik di tengah masa Pandemi Covid-19</p> <ol style="list-style-type: none">1) Strategi apa yang ditempuh PKS pada masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan politik PKS di masa Pandemi Covid-19?2) Apa saja kegiatan pendidikan politik di masyarakat yang dilakukan PKS selama masa pandemi?3) Bagaimana pandangan anda terhadap pendidikan politik PKS tersebut?4) Apa hambatan dalam penerapan strategi itu?5) Apakah strategi tersebut kelak akan digunakan dimasa yang mendatang?
2	<p>b. Media yang diadopsi oleh PKS dalam memberikan pendidikan politik kepada kader dan masyarakat selama masa pandemi Covid-19 di Kota Bogor</p> <ol style="list-style-type: none">1) Apakah Covid-19 berdampak pada media pendidikan politik kader PKS?2) Apakah terdapat perbedaan di masa pandemi Covid-19 dengan masa sebelum pandemi Covid-19 pada media pendidikan politik?3) Bagaimana implementasi media pendidikan politik tersebut sejauh ini?4) Apakah ada workshop, seminar, pengajian yang dilakukan secara online?5) Apa hambatan dari masing-masing media bagi para kader?6) Apakah perbedaan media yang digunakan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan bagi para kader?

3	<p>c. Isu yang diusung oleh PKS dalam memberikan pendidikan politik kepada kader dan masyarakat selama masa pandemi Covid-19 di Kota Bogor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana isu yang dibawa dalam pendidikan politik selama masa pandemi Covid-19? 2) Apa perbedaan isu yang dibawa dalam pendidikan politik tersebut? 3) Apakah posisi PKS dalam level nasional sebagai oposisi pemerintah dibawa dalam pendidikan politik di Kota Bogor? 4) Apakah isu Covid-19 dibawa ke dalam pendidikan politik oleh PKS di Kota Bogor? 5) Apakah ada penanaman nilai-nilai etika politik dalam basis islam oleh PKS Kota Bogor?
---	--

B. Kader PKS Kota Bogor

Nama :

No.	Daftar Pertanyaan
1.	<p>a. Strategi penerapan pendidikan politik oleh PKS sebagai upaya peningkatan partisipasi politik di tengah masa Pandemi Covid-19</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana strategi pendidikan politik PKS pada kader? 2) Apakah ada perbedaan secara strategi antara sebelum pandemi dan saat pandemi? 3) Ada berapa jenjang pendidikan kader PKS? 4) Bagaimana progres pendidikan politik di tiap jenjang tersebut selama masa pandemi Covid-19?
2.	<p>b. Media yang diadopsi oleh PKS dalam memberikan pendidikan politik kepada kader dan masyarakat selama masa pandemi Covid-19 di Kota Bogor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Apa media yang biasa digunakan dalam kegiatan kaderisasi? 2) Apakah media yang digunakan ada perbedaan pada masa pandemi dan sebelum pandemi?

	<p>3) Bagaimana implementasi media pendidikan politik pada kader tersebut sejauh ini?</p> <p>4) Sebagai kader, bagaimana anda melihat penerapan pendidikan tersebut terhadap loyalitas anda terhadap partai?</p>
3.	<p>c. Isu yang diusung oleh PKS dalam memberikan pendidikan politik kepada kader dan masyarakat selama masa pandemi Covid-19 di Kota Bogor</p> <p>1) Bagaimana isu yang dibawa dalam pendidikan politik oleh kader selama masa pandemi Covid-19?</p> <p>2) Apa perbedaan isu yang dibawa dalam pendidikan politik tersebut?</p> <p>3) Apakah isu Covid-19 dibawa ke dalam kaderisasi oleh PKS di Kota Bogor?</p> <p>4) Apa jenis media yang digunakan PKS untuk pendidikan politik pada kader?</p> <p>5) Apa isu yang biasanya di usung pada media tersebut?</p>

C. Masyarakat

Nama :

No.	Daftar Pertanyaan
1.	<p>a. Strategi penerapan pendidikan politik oleh PKS sebagai upaya peningkatan partisipasi politik di tengah masa Pandemi Covid-19</p> <p>1) Apa bentuk strategi pendidikan politik oleh PKS?</p> <p>2) Apakah ada perbedaan secara strategi antara sebelum pandemi dan saat pandemi?</p> <p>3) Apa saja kegiatan pendidikan politik yang dilakukan PKS selama masa pandemi?</p> <p>4) Sebagai masyarakat, apakah strategi tersebut berdampak pada pilihan politik?</p> <p>5) Apa bentuk strategi pendidikan politik yang digunakan PKS pada masyarakat?</p>
2.	<p>b. Media yang diadopsi oleh PKS dalam memberikan pendidikan politik kepada kader dan masyarakat selama masa pandemi Covid-19 di Kota Bogor</p> <p>1) Apa media yang digunakan PKS untuk menyentuh lapisan eksternal seperti masyarakat?</p> <p>2) Apakah penggunaan media tersebut dapat digunakan dengan maksimal oleh</p>

	<p>masyarakat?</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Siapakah yang menjadi narasumber pada kegiatan pendidikan politik? 4) Apakah waktu dilaksanakan pendidikan politik tersebut tepat? 5) Apakah media yang digunakan dapat memberikan dampak positif terhadap daya tarik masyarakat dalam kegiatan atau dunia politik?
3.	<p>c. Isu yang diusung oleh PKS dalam memberikan pendidikan politik kepada kader dan masyarakat selama masa pandemi Covid-19 di Kota Bogor?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Apakah anda telah mengikuti pendidikan politik oleh PKS? 2) Bagaimana isu yang dibawa dalam pendidikan politik oleh masyarakat selama masa pandemi Covid-19? 3) Apa yang membedakan isu yang dibawa PKS dengan partai atau media pendidikan politik lain? 4) Apa perbedaan isu yang dibawa dalam pendidikan politik tersebut daripada pada saat masa sebelum pandemi? 5) Bagaimana anda sebagai masyarakat melihat isu yang diusung oleh PKS? 6) Apakah posisi PKS dalam level nasional sebagai oposisi pemerintah dibawa dalam pendidikan politik di Kota Bogor? 7) Apakah isu Covid-19 dibawa ke dalam pendidikan politik oleh PKS di Kota Bogor?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Muhamad Farhan Maulana
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 21 Juli 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Taman Tirta Cimanggu Blok A3/16 RT05/13 Kel.
Mekarwangi Kec. Tanah Sareal Kota Bogor.
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang
Agama : Islam
No.Telp : 0852-2825-5853
Email : farhan61941@gmail.com

B. DATA PENDIDIKAN

2005-2011 SD Negeri Kukupu 1
2011-2014 SMP Negeri 2 Kemang
2014-2017 SMA Negeri 1 Bojonggede

C. PENGALAMAN ORGANISASI

2019-2020 Kepala Divisi PSDM HMJ UIN Walisongo Semarang

